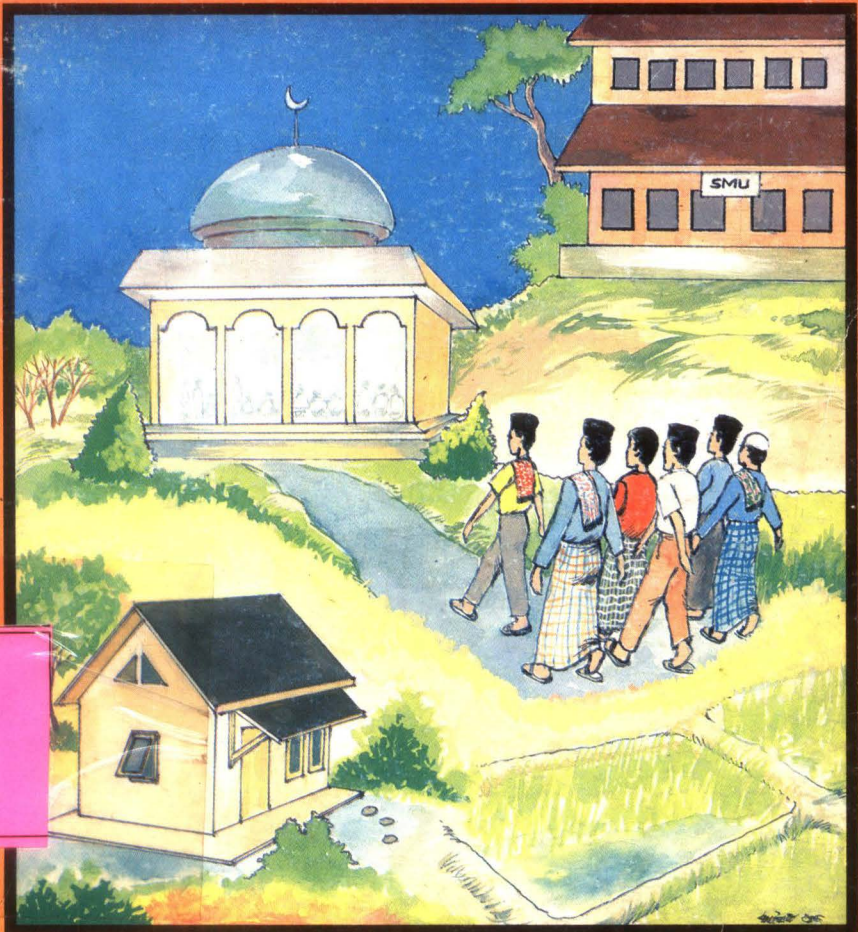




## PERANAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT JAWA TENGAH



Direktorat  
dayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

3066

406

9

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

**PERANAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN  
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
JAWA TENGAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1996**

Judul : Peranan Ulama Dalam Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tengah

Tim Peneliti : Prof. Moeljono Djojomartono MA (Ketua)  
 Drs. Budi Cahyo Utomo M.Pd. (Anggota)  
 Drs. Irawan Haryo Gunadi (Anggota)  
 Dra. Anni Lutfiah (Anggota)

Penyunting : Drs. Warto M. Hum

Diterbitkan oleh : Bagian Proyek P2NB. Jawa Tengah

Cetakan : I

Desain Sampul : Widodo Andoyo

Dicetak : Percetakan Cv. Indragiri Semarang

Hak Cipta Dilindungi : Undang - undang

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan penjelasan pasal 32 Bab XIII Undang-undang Dasar 1945, maka program pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional terus ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertebal kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan Nasional. Keanekaragaman budaya daerah sebagai suatu ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an masyarakat perlu diarahkan menuju keberadaan dan kebudayaan yang maju serta tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu kegiatan proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah pada saat ini adalah melaksanakan penggalian dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berbagai naskah hasil penggalian dan pelestarian tersebut perlu diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Naskah hasil penelitian/perekaman Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya yang berjudul **"Peranan Ulama dalam Pembangunan sosial Budaya Masyarakat Jawa Tengah"** ini mempunyai relevansi dengan pembangunan Nasional. Sehingga hal ini perlu diarahkan sebagai penerapan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga apabila ada saran-saran untuk penyempurnaan buku ini akan kami terima dengan senang hati. Dengan selesainya buku ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga berguna bagi Bangsa dan Negara.

Semarang, Desember 1996

Pemimpin Bagian Proyek  
Pengkajian dan Pembinaan

Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah





**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI  
JAWA TENGAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya buku "Peranan Ulama Dalam Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Tengah" oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah.

Buku ini selain sebagai upaya penggalan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan tradisional tersebut.

Penggalan, pembinaan dan pengembangan budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur akan mampu memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, menunjang terbentuknya kebudayaan Nasional serta mewujudkan ketahanan nasional secara mantap.

Dengan diterbitkannya buku ini, kami harapkan masyarakat akan mendapat gambaran lebih jelas tentang peran serta Ulama dalam pembangunan sosial budaya, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai motivator dan penggerak dalam hal pembangunan baik fisik maupun mental spiritual. Misalnya dalam hal pembangunan fisik, ulama memegang peranan cukup penting untuk menggerakkan masyarakat agar bergotong royong, kerjabakti, membantu menggali dana kepada masyarakat. disamping itu secara langsung mereka memberi contoh dengan ikut memberikan sumbangan dana/material.
2. Dalam hal pembangunan mental spiritual, melalui ceramah-ceramah keagamaan para ulama dapat mendidik, mengarahkan, membina dan sekaligus membawa masyarakat dalam kehidupan yang lebih agamis.
3. Sebagai penisik ikut serta mencerdaskan masyarakat, khususnya dalam hal pengetahuan keagamaan.
4. Sebagai panutan sosial mereka ditikohkan masyarakat, pola kehidupan ulama menjadi panutan. Dalam hal ini langsung atau tidak langsung pola kehidupan ulama merupakan cermin kehidupan masyarakat yang sedang membangun.

Dengan membaca buku ini diharapkan masyarakat Jawa Tengah, khususnya generasi mudanya akan dapat memahami peranan ulama dalam pembangunan sosial budaya yang sangat penting serta mampu mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembinaan dan pengembangan budaya bangsa, khususnya di Jawa tengah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 1996



TP. 130 098 190

# D A F T A R   I S I

|                                                            | Hal       |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                        |           |
| KATA PENGANTAR .....                                       | iii       |
| SAMBUTAN .....                                             | vii       |
| DAFTAR ISI .....                                           | vii       |
| DAFTAR TABEL .....                                         | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                  | 1         |
| 1.2. Masalah Yang Diteliti .....                           | 3         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                               | 3         |
| 1.4. Tinjauan Pustaka .....                                | 3         |
| 1.5. Metodologi Penelitian .....                           | 16        |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....                           | 21        |
| 1.7. Prosedur Penelitian .....                             | 22        |
| 1.8. Jadwal Kegiatan .....                                 | 22        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>        | <b>24</b> |
| 2.1. Gambaran Umum .....                                   | 24        |
| 2.2. Lokasi Penelitian .....                               | 27        |
| <b>BAB III PARTISIPASI ULAMA DALAM PEMBA NGUNAN</b>        | <b>—</b>  |
| <b>NGUNAN SOSIAL BUDAYA .....</b>                          | <b>54</b> |
| 3.1. Partisipasi ulama dalam Kesejahteraan Masyarakat .... | 55        |
| 3.2. Partisipasi ulama dalam Pendidikan .....              | 61        |
| 3.3. Partisipasi ulama dalam Kebudayaan .....              | 67        |
| 3.4. Partisipasi ulama dalam Kesehatan .....               | 69        |
| 3.5. Partisipasi ulama dalam Keluarga Sejahtera .....      | 72        |
| 3.6. Partisipasi ulama dalam Kependudukan .....            | 75        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 3.7. Partisipasi ulama dalam Pembinaan Anak - Remaja ...  | 75         |
| 3.8. Partisipasi ulama dalam Pembinaan Pemuda .....       | 78         |
| 3.9. Partisipasi ulama dalam Peranan Wanita .....         | 81         |
| 3.10. Partisipasi ulama dalam Perumahan / Pemukiman ..... | 84         |
| 3.11. Partisipasi ulama dalam Olah Raga .....             | 85         |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                  | <b>90</b>  |
| 4.1. Kesimpulan .....                                     | 90         |
| 4.2. Saran .....                                          | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                               | <b>100</b> |
| <b>DAFTAR INFORMAN .....</b>                              | <b>101</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                     | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Tabel 1. Komposisi Penduduk Dilihat Dari Umur dan Jenis Kelamin .....            | 31      |
| 2. Tabel 2. Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian 1991/1992 .....                 | 32      |
| 3. Tabel 3. Sarana Perdagangan Dan Sektor lain Di Kelurahan Mranggen Th. 1994 ..... | 33      |
| 4. Tabel 4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 1993 /1994 .....                    | 34      |
| 5. Tabel 5. Jumlah Prasarana Pendidikan, Kesehatan, dll 1993 / 1994 .....           | 37      |
| 6. tabel 6. Sarana Transportasi dan Komunikasi di Mranggen .....                    | 40      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Meningkat dan meluasnya kegiatan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata sehingga dapat diwujudkan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri. Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun dan pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pembangunan. Kesadaran ini merupakan modal utama bagi tumbuhnya semangat dan tekad masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung makna tegas, bahwa pembangunan bukanlah suatu proses deterministik, melainkan suatu proses perubahan yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Pembangunan ingin menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan sesuai dengan makna "manusia seutuhnya" dan bukannya sebagai objek rekayasa sosial-ekonomis. Pembangunan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat Indonesia.



Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) telah menegaskan bahwa berhasilnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Mendasarkan pemahaman terhadap istilah tersebut di atas, maka pengertian partisipasi adalah peran serta atau menjadi terlibat. Dengan menggunakan kata "partisipasi" dalam arti seperti itu, kita disadarkan bahwa suatu kegiatan dalam partisipasi itu merupakan kegiatan usaha bersama. Sebagai usaha bersama, berarti bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tidak boleh menjadi penonton, membiarkan orang lain bekerja sendiri, tetapi harus memiliki artian sebagai **partner** untuk kerja sama. Dengan demikian, kata partisipasi mengandung pula semangat demokrasi, bersifat terangsang positif, dan sukarela. Sukarela berarti ikut serta dengan keikhlasan, bukan karena paksaan.

Dalam pembangunan pedesaan, partisipasi seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat mengembangkan kemandiriannya (**selfreliance**) yang dibutuhkan anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Dan, perlu disadari bahwa bagaimanapun juga proses pembangunan sendiri memang menuntut keterlibatan masyarakat dalam membentuk hari depan masyarakat itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sosial budaya masyarakat, maka partisipasi masyarakat khususnya para ulama merupakan salah satu unsur kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan sosial budaya tersebut. Partisipasi aktif masyarakat khususnya para ulama ini berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menangkap makna dari kegiatan atau program yang bersangkutan. Kemampuan ini dapat menjadi landasan utama bagi keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program tertentu. Makna yang ditangkap, baik positif maupun negatif akan menjadi pendorong atau penghambat keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan.

## **1.2. Masalah yang Diteliti**

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian yang mengacu pada masalah-masalah sebagai berikut :

- a Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan masyarakat di bidang sosial budaya di Daerah Tingkat II Demak.
- b Bagaimanakah partisipasi masyarakat, khususnya para Ulama di Daerah Tingkat II Demak terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a Ingin mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan masyarakat di bidang sosial budaya di Daerah Tingkat II Demak.
- b Ingin mengetahui tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat, khususnya para Ulama di Daerah Tingkat II Demak terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

## **1.4. Tinjauan Pustaka**

### **1.4.1. Pembangunan Sosial Budaya**

Sampai tahun 1970-an definisi pembangunan yang digunakan untuk mengarahkan program-program nasional terpusat pada kriteria laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan nasional diukur dari produk domestik bruto (GNP). Paradigma ini ternyata tidak terbukti bagi pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang. Sebagai contoh adalah akibat revolusi hijau di Pakistan, India, dan Philipina seperti yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1985). (Bandingkan pula dengan Joyomartono, 1991).

Berdasarkan kritik-kritik yang dilontarkan oleh berbagai ahli terhadap paradigma pembangunan yang pertama dianut, lahir konsep pembangunan yang baru. Konsep yang baru ini lebih mengutamakan pada nilai-nilai yang lain, di antaranya adalah kemajuan sosial, persamaan, dan kebebasan. Suatu perubahan yang memungkinkan masyarakat memperluas fungsi pengawasannya terhadap lingkungan mereka. Konsep yang baru ini seperti yang dikemukakan oleh Norman T. Uphoff, dkk. (1979), perhatiannya lebih banyak ditekankan pada pengembangan warga negara, dengan memberi perhatian pada desentralisasi administrasi dan perencanaan yang fleksibel, berusaha untuk mengembangkan **output** dalam sektor-sektor pertanian yang kecil, penyediaan pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi golongan yang lemah. Dan, untuk mencapainya ditempuh melalui pendidikan diri sendiri dan keterlibatan (partisipasi) semua warga masyarakat dalam proses pembangunan atau perubahan sosial yang direncanakan (Bandingkan dengan Cochrane, 1971; Rogers, 1985; dan Joyomartono, 1991). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1978 juga sangat menekankan pentingnya partisipasi semua warga masyarakat sebagai jaminan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan sosial budaya suatu masyarakat dengan demikian adalah suatu proses perubahan yang terarah yang dilakukan dengan sadar untuk mengubah kondisi masyarakat, khususnya dalam aspek sosial budaya. Dengan sosial budaya dimaksudkan sebagai struktur dan pola-pola hubungan sosial, misalnya struktur keluarga dan fungsi keluarga, serta sistem ide yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat yang bersangkutan yang mencakup nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, simbol-simbol, dan teknologi (Joyomartono, 1991). Di dalam GBHN, pembangunan masyarakat dalam aspek sosial budaya ini mencakup : (1) kesejahteraan, (2) pendidikan, (3) kebudayaan, (4) kesehatan, (5) keluarga sejahtera, (6) kependudukan, (7) anak dan remaja (8) pemuda, (9) peranan wanita, (10) perumahan dan pemukiman, dan (1) olah raga.

#### **1.4.2. Kebijakan Pembangunan Desa**

Pembangunan masyarakat di tingkat desa meliputi berbagai sektor dan program yang dilaksanakan oleh berbagai aparat departemen,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sedang pelaksanaan serta pelayanan pembangunan itu lebih banyak memanfaatkan tenaga yang berasal dari desa itu sendiri, khususnya pemuka masyarakat dengan mendapatkan bimbingan dari masing-masing aparaturnya serta petugas lapangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam kegiatan ini Kepala Desa yang bertugas sebagai koordinator.

Berdasarkan kebijaksanaan Pembangunan Daerah dari Departemen Dalam Negeri (Said dalam Sajogyo, 1990), pembangunan masyarakat di tingkat desa mencakup tiga kegiatan, yaitu : (a) kegiatan pengembangan sosial budaya, (b) kegiatan pengembangan ekonomi desa, dan (c) kegiatan pemeliharaan prasarana desa. Kegiatan pengembangan sosial budaya meliputi kegiatan pengembangan ketrampilan penduduk, pengembangan sosial budaya, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan dikoordinasi oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Program utama LKMD terdiri dari tiga hal : (a) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui Pusat Latihan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, di mana individu-individu dan pemuka-pemuka masyarakat dilatih untuk mendapatkan kader yang mampu dan trampil sebagai motivator, dinamisator, dan katalisator dalam pembangunan, (b) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan 10 program pokoknya, dan (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, administrasi dan kepengurusannya agar masyarakat dan pemerintah merasakan manfaatnya.

#### **1.4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Partisipasi adalah istilah pembangunan yang menjadi sangat populer semenjak Orde Baru, terutama sejak Pelita I tahun 1969 (Gultom, 1985). Istilah partisipasi cukup luas dipakai di kalangan masyarakat, sehingga hampir di berbagai organisasi, perkumpulan, atau kegiatan, selalu muncul kata-kata berpartisipasi.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa berhasilnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad

dan semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian yang tercantum dalam GBHN tersebut, ternyata ada kaitan antara lahirnya partisipasi dengan lahirnya sikap mental.

Mendasarkan pemahaman terhadap istilah tersebut di atas, maka pengertian partisipasi adalah peran serta atau menjadi terlibat. Dengan menggunakan kata "partisipasi" dalam arti seperti tersebut itu, kata disadarkan bahwa suatu kegiatan dalam partisipasi itu merupakan kegiatan usaha bersama.

Sebagai usaha bersama, berarti bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan partisipasi tidak boleh menjadi penonton, membiarkan orang lain bekerja sendiri, tetapi harus memiliki artian sebagai **partner** untuk kerja sama. Dengan demikian, kata partisipasi mengandung pula semangat demokrasi, bersifat terangsang positif, dan sukarela. Sukarela berarti ikut serta dengan keikhlasan, bukan karena paksaan.

Partisipasi yang meluas merupakan ciri khas modernisasi (pembangunan). Istilah partisipasi telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi? Di dalam penelitian ini, partisipasi pengertiannya ditekankan pada aktivitasnya yang menyangkut keberlangsungan suatu program (pembangunan).

Partisipasi di sini mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk ikut mendukung atau melaksanakan aktivitas yang **conform** dengan program pembangunan dan program-program kebijakan pemerintah lain, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk ikut menunjang atau mempengaruhi terselenggaranya program-program pembangunan. Yang pertama dapat dinamakan atau digolongkan sebagai partisipasi **otonom**, sedangkan yang terakhir merupakan partisipasi yang dapat digolongkan sebagai partisipasi **dimobilisasikan**.

Partisipasi otonom atau swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan berperan sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri. Sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki artian bahwa

keikutsertaan atau berperan sertanya seseorang atas pengarahannya orang lain (Gultom, 1985).

Partisipasi mengandung nilai dan strategi. Sebagai suatu nilai, partisipasi bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan, melainkan juga merupakan tujuan. Partisipasi sebagai suatu nilai merupakan tumpuan demokrasi dan sekaligus merupakan jaminan berfungsinya demokrasi itu. Partisipasi mengisyaratkan kerjasama dengan banyak pihak, dan di dalam kerjasama itu orang mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan segenap dan sebatas kemampuannya. Sedang berdasarkan pengertian partisipasi sebagai strategi, berpartisipasi berarti turut menentukan arah dan cara pencapaian sesuatu tujuan.

Beberapa sifat atau kualifikasi partisipasi dapat kita sebut antara lain : positif, kreatif, kritis, korektif-konstruktif, dan realistis. Partisipasi dikatakan positif apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya partisipasi menjadi negatif, apabila menjadi beban, penghalang, atau memperlambat lajunya kegiatan atau usaha bersama.

Partisipasi yang kreatif berarti keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya ikut begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru. Kreasi diwujudkan dalam gagasan-gagasan baru, dapat berupa metode, teknik baru, cara baru yang lebih efektif dan efisien, yang semuanya mengantarkan suksesnya usaha bersama itu.

Partisipasi dapat dikatakan kritis-korektif-konstruktif apabila keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu jenis atau bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan, dan memberikan alternatif yang lebih baik. Dengan partisipasi yang kritis-korektif-konstruktif, bukan saja proses usaha bersama lebih lancar, tetapi juga akibat-akibat negatif dapat dicegah. Sifat kritis-korektif-konstruktif dari suatu partisipasi sangat berguna untuk menjaga agar perencanaan dan pelaksanaan suatu usaha bersama benar-benar baik dan dapat mencapai tujuan.

Partisipasi yang realistis mempunyai arti bahwa keikutsertaan seseorang dengan memperhitungkan realitas atau kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun realitas mengenai kemampuan, waktu yang tersedia, dan adanya kesempatan dan ketrampilan (Gultom, 1985).

Partisipasi dalam pembangunan merupakan satu fenomena yang jauh lebih kompleks. Ia bukan merupakan satu variabel tunggal yang homogen. ia sebenarnya mencakup banyak bentuk tindakan yang berlainan; semua tindakan itu dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau program pemerintah pada suatu tingkat, akan tetapi tidak semua tindakan itu berkaitan satu sama lain. Lingkup dan intensitas partisipasi juga bisa berubah-ubah, kadang-kadang secara terlepas satu sama lain dan seringkali saling bertentangan.

Hakekat partisipasi dalam pembangunan merupakan integritas mental dan fisik individu-individu dalam lingkup sistem pembangunan suatu negara-bangsa. Partisipasi sebagai tingkat kesadaran optimal berlandaskan kepada konstruksi pikiran yang memotivasi berlangsungnya suatu aktivitas fisik. Pada prinsipnya partisipasi merupakan refleksi dari perilaku setiap individu sebagai warga negara yang merasa bertanggungjawab atas kelangsungan hidup negaranya. Partisipasi juga merupakan indikator dalam menilai kemampuan para penyelenggara negara atau para pelaksana birokrasi dalam menyertakan seluruh warga negaranya untuk bersama-sama melaksanakan kebijaksanaan elit pengusaha (Sumarno, 1990).

Secara dimensional partisipasi dalam pembangunan sosial budaya berkaitan dengan pembangunan bidang sosial budaya sebagaimana telah dirumuskan dalam GBHN 1993. Pembangunan sosial budaya ini menyangkut kehidupan negara dengan segala aspek dan problema yang dihadapi. Oleh karenanya partisipasi dalam pembangunan sosial budaya bersifat dimensional yang berada pada seluruh struktur masyarakat. Oleh karenanya kualitas partisipasi politik tersebut selalu akan bervariasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan status sosial para partisipan itu sendiri. Secara netral kita dapat mengklasifikasikan partisipasi yang berlandaskan pada latar belakang pendidikan sebagai berikut (Sumarno, 1990) : (a) partisipasi dalam wujud konsep dan pola pikir, (b) partisipasi dalam wujud perilaku dan kegiatan, (c) partisipasi dalam wujud kegiatan saja, (d) partisipasi dalam wujud ketiga **point** di atas. Apabila keempat tingkatan tersebut dalam satu gerakan maka dapat disebut sebagai **integrated political participation**, atau partisipasi politik yang terintegrasi.

Dari uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa partisipasi merupakan pencerminan dari perilaku warga negara yang turut memikirkan dan merasa bertanggungjawab atas kelangsungan hidup negaranya. Perilaku semacam ini berlandaskan pada nilai normatif yang telah diakui secara legitimasi dan keabsahannya oleh seluruh warga masyarakat negara. Perilaku yang terkristal dalam wujud partisipasi dapat berlangsung secara konvensional sebagaimana suatu keharusan yang berada dalam suatu sistem atau program pembangunan. Atau dalam kondisi tertentu partisipasi sebagai perwujudan fisik dari pendapat umum yang mendukung terhadap kebijakan elit berkuasa (pemerintah), karena tindakan dan pelaksanaan operasional kenegaraan sesuai dengan tata nilai yang berlaku sebagaimana halnya dengan pendapat umum yang memiliki karakteristik selalu beranjak dari norma dan etika pergaulan hidup bernegara.

Setiap tindakan seseorang, pada dasarnya bertolak dari dasar-dasar yang kuat (Cohen, 1968). Misalnya, untuk mengemukakan pendapat biasanya dilandasi oleh alasan yang kuat atau mendasar. Demikian juga dengan tindakan yang diambil seseorang biasanya berhubungan dengan : (1) Upaya untuk mencapai tujuan, (2) Tindakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, (3) Tindakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sampingan (nurturant effect), di samping tujuan utama, (4) Tindakan seseorang dipengaruhi oleh sarana yang ada, (5) Kemungkinan tercapai tujuan akan mempengaruhi tindakan seseorang, (6) Tindakan seseorang dipengaruhi oleh situasi dan pengetahuan yang dimilikinya, (7) Tindakan seseorang dipengaruhi oleh persepsi dan gagasan-gagasannya mengenai situasi dan cara mencapai tujuan, (8) Tindakan seseorang senantiasa memiliki pradaya untuk mempengaruhi persepsi anggota masyarakat dan pemilihan strategi kegiatannya, (9) Tindakan seseorang senantiasa didasarkan pada norma dan nilai tertentu yang mengatur pemilihan tujuan dan skala prioritasnya.

Bertolak dari uraian di atas, maka tindakan seseorang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya yang kompleks. Itulah sebabnya dalam banyak hal dalam proses sosialisasi maupun pelaksanaan program (apapun) dalam masyarakat perlu adanya suatu rekayasa budaya (kultural).

Partisipasi dalam pembangunan di Indonesia selalu berorientasi pada strategi atau sistem pembangunan nasional yang melihat bangsa



Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh. Partisipasi terarah pada integritas mental dan fisik dalam bidang pembangunan bangsa yang dituangkan melalui tahapan proses pembangunan bangsa.

Dalam konteks pembangunan sosial-budaya, tingkat, bentuk, dan landasan partisipasi politik dibentuk oleh prioritas-prioritas yang diberikan oleh kaum elit, golongan-golongan dan perseorangan-perseorangan kepada partisipasi sebagai satu tujuan pembangunan, nilainya dalam pandangan mereka sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lain, dan sampai sejauh mana partisipasi itu sendiri merupakan produk sampingan atau konsekuensi dari pembangunan.

Tingkat, bentuk dan landasan partisipasi di dalam suatu masyarakat mempunyai kaitan yang sangat akrab dengan tingkat pembangunan. Di dalam masyarakat yang sedang membangun partisipasi politik merupakan sesuatu yang secara inheren diperlukan agar sistem politik dapat berfungsi secara efektif. Dengan demikian, partisipasi mempunyai nilai sebagai satu tujuan dalam pembangunan itu sendiri (Huntington 1990).

Baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang partisipasi yang sangat tinggi dari warganegaranya adalah hal yang sangat utama, maka akan disayangkan sikap apatis dan masa bodoh dari warganya berkaitan dengan partisipasi ini. Tingkat-tingkat partisipasi yang tinggi, dalam bentuk-bentuk yang mencerminkan norma-norma masyarakat dipandang sebagai suatu kebaikan kolektif.

Partisipasi dalam pembangunan sosial budaya anggota masyarakat berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menangkap makna dari eksistensi program pembangunan sosial budaya melalui program pemerintah secara utuh (keseluruhan). Oleh karena itu untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program-program sebagai kebijakan pemerintah paling tidak dapat dilihat dari empat tahap kegiatan, yaitu : (1) tahap pengenalan, (2) perencanaan, (3) pelaksanaan, dan (4) tahap pemanfaatan (Lihat Soemanto, 1987)

Pada **tahap pengenalan**, anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan pemahaman arti, tujuan dan manfaat program-program atau kebijakan pemerintah dalam rangka menjalankan sistem politik nasional yang dipilihnya. Dalam tahap ini, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah mengorganisasikan paket informasi program untuk

diperkenalkan kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah. Secara operasional, usaha memperkenalkan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada anggota masyarakat lebih melibatkan secara langsung petugas instansi pemerintahan. Di samping itu, pengenalan program-program atau kebijakan pemerintah dapat dilakukan melalui instansi / lembaga non pemerintahan maupun media massa. Secara singkat pada tahap ini dapat dilihat bagaimana **keterlibatan** masyarakat itu dalam **proses sosialisasi program** secara utuh.

Dengan mengenal sistem dan kebijakan atau program-program pemerintah secara utuh dan tuntas, dimungkinkan anggota masyarakat akan menjadi lebih sadar dan tergugah untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, sejak awal anggota masyarakat sudah mengetahui duduk persoalan tentang sistem yang dianut dan program serta kebijakan pemerintah sehingga **partisipasinya** pada tingkat dini sudah **dilandasi komitmen moral** mengenai kegiatan pembangunan di bidang sosial budaya yang dirintis dan harus dilaksanakan.

Pada **tahap perencanaan**, anggota masyarakat diharapkan telah **memiliki gagasan-gagasan** sebagai wujud akan kepentingannya yang bisa disalurkan melalui forum pembicaraan dan pembahasan rencana kerja di masing-masing lembaga, instansi, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan yang akan menampung aspirasinya. Prosedur kerja perencanaan ini bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan primer atau sekunder yang merupakan satuan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai masukan yang berharga bagi penyusunan perencanaan kerja pada umumnya. Hasil diskusi itu merupakan **akumulasi kebutuhan dasar** yang akan dituangkan dalam rencana kerja (program) dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini juga akan menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya atau mungkin **menghilangkan praduga mengenai kerugian** yang bisa diderita masyarakat sebagai akibat sistem yang ada dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Partisipasi masyarakat pada **tahap pelaksanaan** kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti aktivitas secara aktif dalam berbagai kegiatan, aktivitas setengah aktif, atau balikan pasif secara fisik. Pada dasarnya partisipasi masyarakat pada tahap

ini dilakukan karena **adanya dorongan atau motif** akan adanya perbaikan hidupnya dengan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Akhirnya **tahap menimbang atau mengevaluasi mengenai aspek manfaat** dari keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan program pemerintah oleh masyarakat merupakan salah satu partisipasinya juga. Besar kecilnya manfaat dari kegiatan dan program pemerintah merupakan indikator keberhasilan dan kelangsungan proses pembangunan sosial budaya tersebut sebagai proses internalisasi budaya baru. Apabila manfaatnya dinilai besar, maka memungkinkan berlanjutnya proses internalisasi budaya baru yang dibawa oleh kegiatan program tersebut. Dan, proses internalisasi sesungguhnya dipengaruhi oleh derajat partisipasi anggota masyarakat sejak awal kegiatan pembangunan sebagai kebijakan pemerintah diperkenalkan hingga selesai.

Dari uraian di muka jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mutlak diperlukan, walaupun harus diakui bahwa bantuan dan/atau pengarahan dari pemerintah (atasan) masih diperlukan (Joyomartono, 1991). Partisipasi dapat diberi makna sebagai keterlibatan sejumlah besar orang dalam situasi atau tindakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mereka (Uphoft, 1979). Salah satu pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan pimpinan informal dalam proses pembangunan.

Norman T. Uphoft dkk. (1979) menunjukkan adanya tiga dimensi partisipasi : (1) jenis partisipasi apa yang dipertimbangkan, (2) siapa yang berpartisipasi di dalamnya, (3) bagaimana partisipasi itu berlangsung.

#### a. Jenis partisipasi

Ada empat jenis partisipasi yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pemanfaatan, dan (4) partisipasi dalam evaluasi.

#### b. Siapa yang berpartisipasi

Dalam pembangunan masyarakat desa, yang berpartisipasi di dalamnya dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu : (1) penduduk lokal yang dapat dirinci berdasarkan usia, jenis kelamin, status keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal ; (2) pimpinan

lokal, termasuk di dalamnya pimpinan informal, pimpinan asosiasi; (3) pegawai pemerintah, dan (4) pegawai asing.

c. Bagaimana partisipasi berlangsung

Termasuk di dalam persoalan bagaimana partisipasi berlangsung menyangkut pertanyaan (1) apakah inisiatif berpartisipasi kebanyakan datang dari administrator atau komunitas lokal; atau (2) apakah dorongan berpartisipasi karena kehendak sendiri atau paksaan, (3) struktur dan (4) saluran partisipasi, misalnya apakah partisipasi itu berlangsung secara individual atau kelompok, dengan organisasi formal atau informal, (5) pelaksanaan, (6) lingkup partisipasi, (7) kewenangan, yaitu mana yang efektif antara melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan atau pelaksanaan.

#### 1.4.4. Peranan Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam, yang secara tradisional berfungsi sebagai **khatib (preachers)**, guru, dan konselor komunitas Islam. Di dalam komunitas lokal dominasi autoritas mereka semula terbatas pada pengurusan masjid dan/ atau madrasah tempat mereka memberikan pelayanan sebagai fungsionaris bidang religi.

Dalam sejarah perkembangan peradaban Islam di tempat-tempat hampir di seluruh dunia, ulama seringkali muncul sebagai **leader** dari gerakan pembaharuan sosial dan politik. lama menerima peranan sosial seperti itu dimungkinkan karena : pertama, berdasarkan fakta bahwa secara historis ulama dianggap dirinya sebagai pusat orientasi nurani moral Islam, dan kedua, dari fakta bahwa mereka memberikan pelayanan di masjid dan madrasah tempat orang-orang muslim secara reguler berkumpul.

Di tempat itu ulama juga mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas, umat, dan keyakinan. Oleh karena itu di dalam masyarakat ulama berperan kecuali dalam ketiga hal seperti disebut di atas juga berperan sebagai **patron**, sebagai wakil rakyat, sebagai **mediator** antara komunitas dengan sistem sosial yang berada di luarnya, dan bahkan sebagai pemimpin dan penggerak perjuangan melawan kekuasaan asing

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tampak misalnya dalam pertempuran lima hari di Semarang.

Peranan ulama dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh ulama. Tindakan yang dilakukan diartikan sebagai keikutsertaan (partisipasi) dalam proses suatu kegiatan dalam hal ini adalah pembangunan masyarakat di bidang sosial budaya. Keikutsertaan (partisipasi) ulama sebagai **local leader** mengacu pada jenis dan cara berpartisipasi tersebut di atas. Termasuk pula di dalamnya partisipasi dalam bentuk pemberian sumbangan fisik, materi, dan bukan materi.

Partisipasi dalam bentuk bukan materi dapat berwujud sebagai penyuluh, sebagai **leader** dalam proses persuasi dan konfirmasi dalam rangka inovasi. Sebagai penyuluh mungkin saja ulama itu melakukan kegiatan memberi informasi, memberi motivasi, memperlancar proses difusi inovasi, dan sebagai penghubung antar sistem yaitu instansi-instansi yang menangani program pembangunan dan masyarakat.

Ulama memiliki peran dan kedudukan strategis dalam aspek sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, ulama dapat menjalankan fungsi pengendali kehidupan masyarakat. Kedudukannya sejajar dengan pemimpin formal bahkan tidak jarang masyarakat menganggapnya lebih tinggi dari pemimpin formal dan menjadikan mereka sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tingkah laku dan perbuatan para ulama sehari-hari pada umumnya diikuti oleh kelompok masyarakat di bawahnya. Seringkali masyarakat menerimanya tanpa **reserve**, tanpa koreksi apakah semua yang dijalankan pemimpin agama (ulama) itu benar atau menyimpang dari ajaran agama. Pemimpin agama atau ulama merupakan kelompok orang yang dipandang telah memahami agama, dan mempunyai kedudukan yang tinggi berkat pengetahuan keagamaan mereka itu.

Siapa saja yang telah memiliki pengetahuan agama sampai suatu ukuran atau tingkat tertentu yang telah umum diterima masyarakat dapat menjadi seorang alim meskipun martabat dan pengaruhnya tergantung dari kesalehan perorangan dan pengabdian mereka kepada ilmunya. Masyarakat mengharapkan dan memberikan ukuran moral yang sangat tinggi kepada para ulama. Sebaliknya masyarakat akan mengecam lebih hebat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan serta kesalahan-

kesalahan mereka dibandingkan rakyat biasa. Rakyat percaya bila tuna aksara meninggal dunia maka dosa-dosanya akan lenyap bersamanya, tetapi seorang alim yang meninggal dunia maka dosa-dosanya akan hidup terus.

Dengan demikian jelaslah bahwa ulama memiliki kedudukan yang penting dan terhormat di hati masyarakat, sehingga kelompok-kelompok ini dalam kegiatan pembangunan mempunyai peran yang sangat besar. Sebagai golongan yang sangat dihormati dan menjadi panutan masyarakat, tentu para ulama dapat menerima informasi-informasi pembangunan secara terbuka untuk selanjutnya ditransformasikan secara konkrit agar dapat dijalankan dan diikuti oleh umatnya. Oleh karena itu peran dan partisipasi ulama dalam pembangunan secara umum dan khususnya di bidang sosial budaya memiliki arti dan peran yang strategis.

Kegiatan di bidang sosial budaya yang melibatkan golongan ulama sebagai tokoh nonformal dalam masyarakat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Bobot keterlibatan ulama dalam pembangunan sosial budaya dapat dilihat dari partisipasinya yang meliputi perencanaan atau pengenalan, pelaksanaan dan pemanfaatan atau evaluasi. Sehingga dengan demikian tahap-tahap tersebut merupakan prasyarat bagi partisipasi ulama dalam pembangunan sosial budaya.

Pada tahap pengenalan program pembangunan sosial budaya para ulama terlibat dalam kegiatan pemahaman arti, tujuan dan manfaat program pembinaan. Dengan mengenal program-program tersebut, golongan ulama akan lebih tergugah dan sadar untuk mengikuti program pembangunan sosial budaya. Dengan demikian sejak awal para ulama sudah mengerti duduk persoalannya, sehingga partisipasi golongan ulama pada tingkat dini sudah dilandasi komitmen moral atas program pembinaan yang dirintis untuk dipelajari, dijalankan agar dapat dihayati sebagai bagian dari tata kehidupannya.

Pada tahap perencanaan ulama diharapkan telah mempunyai gagasan-gagasan sebagai wujud kepentingan yang dapat disalurkan lewat suatu pembicaraan dan pembahasan rencana program kerja dalam rangka mensukseskan program pembangunan bidang sosial budaya.

Partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan sosial budaya dapat terlihat dari berbagai bentuk kegiatan seperti dalam aktivitas

kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya di lingkungannya yang berlangsung secara kontinyu, berupa kegiatan setengah aktif maupun balikan pasif secara fisik. Partisipasi pada tahap ini sering diidentifikasi sebagai bobot partisipasi yang besar, karenanya partisipasi ini disebut juga ukuran keberhasilan pembangunan sosial budaya. Pada dasarnya partisipasi pada tahap ini dilakukan oleh dorongan atau motif yang pada intinya untuk memperbaiki keadaan sehingga bayangan akan perbaikan akan dipetik dengan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial budaya.

Tahap menimbang, mengevaluasi aspek manfaat dari keterlibatannya dalam pembangunan sosial budaya oleh para ulama juga merupakan partisipasi akhir dari tahap pembangunan bidang sosial budaya. Sebab ada tidaknya serta besar kecilnya manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pembangunan sosial budaya.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

Dalam bagian ini akan dijelaskan secara singkat berbagai hal pokok yang berkaitan dengan metodologi penelitian kualitatif, khususnya yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

### **1.5.1. Bidang Penelitian**

Ruang garapan penelitian ini ada dalam bidang sosial. Objek penelitian ini adalah aktivitas masyarakat dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada peranan ulama dalam pembangunan sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah.

### **1.5.2. Bentuk dan Strategi Penelitian**

Bentuk dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terpancang. Bentuk ini diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang mendalam dan penuh nuansa, yang jauh lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka (Sutopo, 1989). Hal ini sesuai dengan masalah yang dikaji

yang sangat berkaitan dengan proses dan makna dari aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya.

### **1.5.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan maksud untuk memperoleh lebih banyak dan lebih bervariasi informasi dari para ulama dan dengan demikian dapat memperluas pemahaman peneliti tentang subjek yang diteliti, maka dalam kesempatan ini dipilih salah satu desa yang banyak dihuni oleh para ulama. Desa yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah desa Mranggen, Kecamatan Mranggen di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

### **1.5.4. Sumber Data**

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Informan.
- b. Tempat dan peristiwa yang meliputi berbagai lokasi dimana aktivitas para ulama dan masyarakat berperan serta dalam pembangunan bidang sosial budaya.
- c. Dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan sosial budaya di Demak.

### **1.5.5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

#### **a. Wawancara**

Teknik wawancara ini tidak dilakukan secara tertutup, kaku dan formal, melainkan dilaksanakan secara luwes, terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan serta mendalam. Kelonggaran cara ini diharapkan mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan sehingga diperoleh informasi



yang sebenarnya, sehingga dapat dibedakan antara informasi yang sesungguhnya dengan informasi yang semu.

Wawancara dilakukan terhadap ulama yang dipilih dan pemuka masyarakat non ulama. Pemilihan ulama sebagai informan dilakukan dengan teknik "bola salju". Mula-mula ditemui seorang pemuka masyarakat atas petunjuk Lurah, selanjutnya ditelusuri lewat informasi dari tokoh yang ditunjukkan oleh tokoh sebelumnya.

## **b. Observasi**

Teknik ini merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, meskipun hanya bersifat partisipasi pasif (Spradley, 1980), karena peneliti tidak terlibat atau berperan langsung dalam kegiatan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan secara formal maupun tidak formal untuk mengamati berbagai langsung dalam kegiatan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan secara formal maupun tidak formal untuk mengamati berbagai peristiwa dan kondisi aktivitas masyarakat berkaitan dengan pembangunan sosial budaya.

## **c. Mencatat dokumen**

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data yang telah terdokumentasi dan berkaitan dengan pelaksanaan dan pembangunan sosial budaya di daerah penelitian.

### **1.5.6. Teknik Cuplikan**

Dalam penelitian kuantitatif teknik sampling lebih ditujukan untuk menarik generalisasi yang bersifat statistik dari suatu populasi. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat **purposive sampling**, di mana peneliti lebih cenderung untuk memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan secara mendalam (Sutopo, 1988).

Teknik cuplikan semacam ini lebih tepat disebut **internal sampling**. Dalam menentukan informan yang tepat, ditentukan atas dasar informasi formal maupun informal. Dalam hal ini dilakukan penjajagan terlebih dahulu untuk menghindari terjadi adanya informan ganda dengan fungsi yang berbeda.

Pemilihan informan secara tepat akan membantu peneliti agar secepatnya dan seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat (Lincoln & Guba, 1985). Kecuali itu, informan yang dipilih secara tepat berfungsi untuk membantu menjangkau informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, untuk bertukar pikiran, atau untuk membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari informan lain (Bogdan & Biklen, 1984).

### **1.5.7. Validitas Data**

Validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian, oleh karena itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Ada beberapa teknik pemeriksaan data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan atau mengetahui validitas data, seperti triangulasi, re-view informan, member check, menyusun data base, dan penyusunan semua mata rantai bukti penelitian (Sutopo, 1990).

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik triangulasi. Denzin membedakan adanya empat macam triangulasi sebagai teknik pengujian data, yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 1989). Dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi sumber.

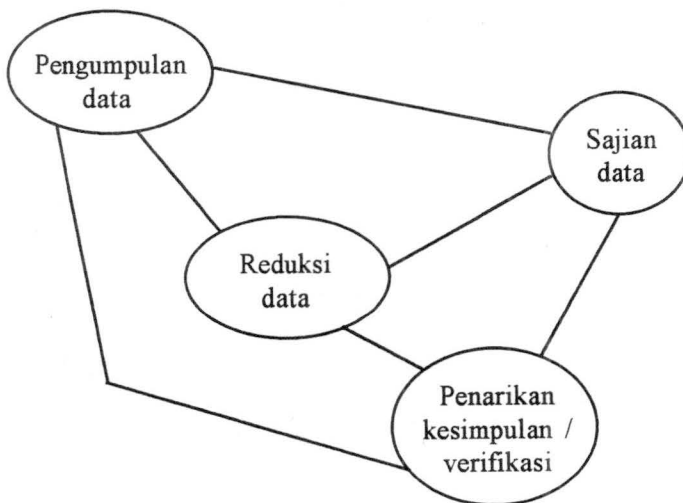
Triangulasi di atas dalam penelitian ini seperti yang disarankan oleh Patton (1980) dilakukan dengan cara : (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu itu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan, dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

### **1.5.8. Teknik Analisis**

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang benar-benar harus dipahami dan diperhatikan setiap peneliti, yaitu :

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo, 1990). Sedangkan analisisnya menggunakan model analisis interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Aktivitas interaktif dilakukan selama proses pengumpulan data, di mana peneliti membuat reduksi dan sajian data.

Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti mulai bergerak lagi di antara tiga komponen itu. Apabila peneliti merasa kurang mantap terhadap kesimpulannya, karena ada kekurangan dalam reduksi dan sajian data, maka peneliti dapat menggalinya dalam **field note**. Seandainya dalam **field note** tidak dapat ditemukan data yang dimaksud, maka peneliti harus mengadakan pengumpulan data lagi bagi pendalaman analisisnya. Proses analisis interaksi dapat ditunjukkan dalam bagan dibawah ini (Lihat Gambar 2). Perlu dijelaskan pula disini, bahwa secara keseluruhan pola pemikiran studi ini bersifat **empiro inductive**, yang merupakan kebalikan dari pola pemikiran kuantitatif yang bersifat **hypothetico deductive** (Kirk and Miller, 1986).



Gb. 1.1. **Model analisis interaktif**  
( Sutopo, 1990 )

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Kegiatan penelitian ini secara keseluruhan pada dasarnya meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu : tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian.

### **1.6.1. Persiapan**

- a. Penyusunan proposal penelitian.
- b. Pengurusan perijinan penelitian.
- c. Penentuan informan penelitian.
- d. Penyusunan jadwal kegiatan dan pedoman pengumpulan data.
- e. Melatih para pembantu pengumpulan data.

### **1.6.2. Pengumpulan Data**

- a. Mengumpulkan di lokasi penelitian dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen.
- b. Mengkaji data yang telah terkumpul dan menyusun refleksinya.
- c. Mengkaji masalah yang dianggap penting, guna menentukan strategi pengumpulan data berikutnya.
- d. Menguji validitas data.
- e. Mengumpulkan data yang lebih memfokus dan mempersiapkan analisis awal.

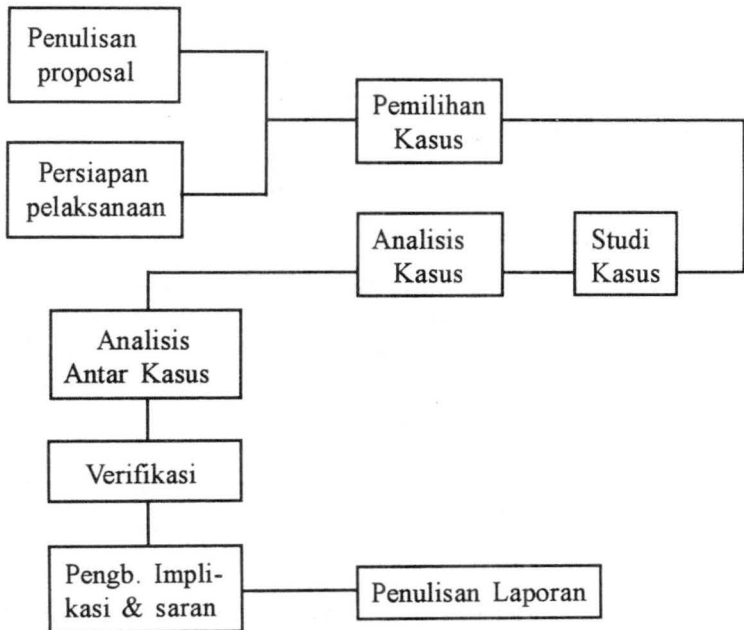
### **1.6.3. Analisis Data**

- a. Melakukan analisis awal (tiap kasus), apabila data yang terkumpul sudah cukup lengkap.
- b. Mengembangkan reduksi data, sajian data, dengan melakukan coding.
- c. Melakukan analisis data temuan (analisa antar kasus).
- d. Mengadakan pengayaan dan pendalaman data, jika terdapat kekurangan (lengkap dan jelas).
- e. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian.
- f. Pengembangan implikasi dan saran.

### **1.6.4. Penyusunan Laporan**

- a. Menyusun laporan penelitian sementara.
- b. Penilaian laporan penelitian sementara dengan para penilai atau melalui seminar.

- c. Perbaikan laporan dan penyusunan laporan akhir.
- d. Penggandaan laporan.
- e. Bagan prosedur penelitian.



Gb. 1.2. **Prosedur Kegiatan Penelitian**

### 1.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut :

| No. | K e g i a t a n             | Bulan Ke |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                             | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Persiapan                   | *        |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.  | Rencana kerja / koordinasi  | *        |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.  | Penyusunan proposal         | *        |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.  | Pengumpulan data            | *        | * | * | * |   |   |   |   |
| 5.  | Kompilas / penyusunan data  |          |   | * | * | * |   |   |   |
| 6.  | Analisis data               |          |   |   | * | * | * |   |   |
| 7.  | Perumusan hasil penelitian  |          |   |   |   | * | * | * |   |
| 8.  | Pembahasan hasil penelitian |          |   |   |   |   | * | * |   |
| 9.  | Penyusunan laporan akhir    |          |   |   |   |   |   |   | * |

## **BAB II**

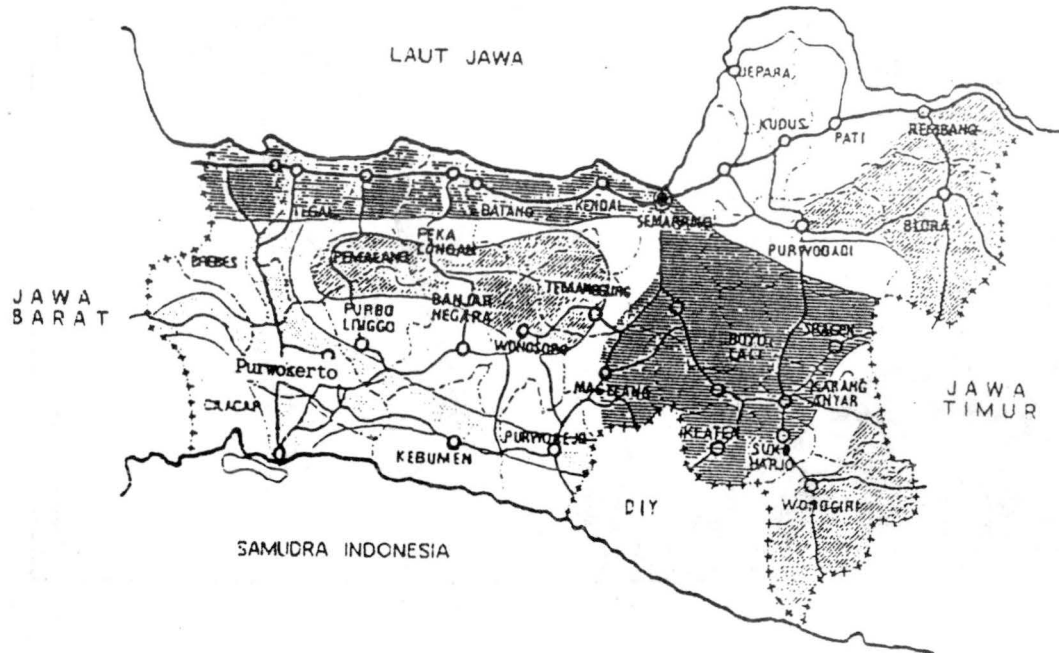
### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **2.1. Gambaran Umum**

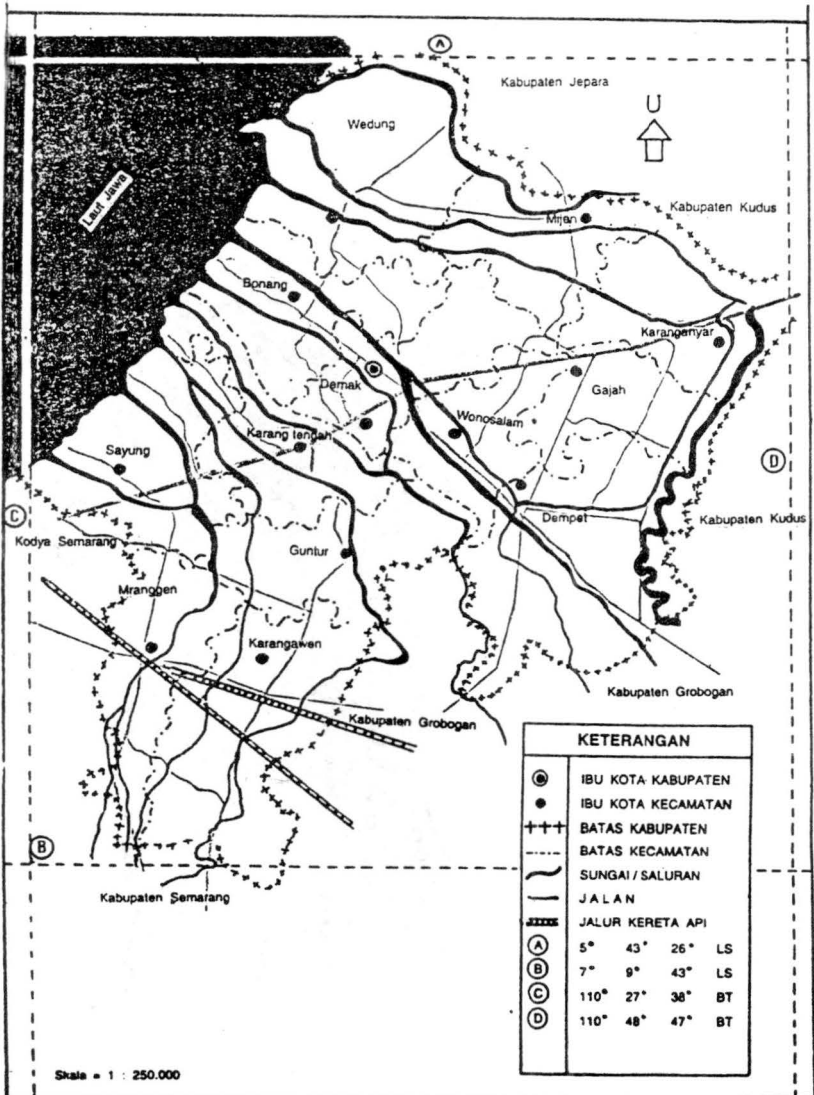
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak termasuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang terletak antara  $110^{\circ} 27' 58''$  -  $110^{\circ} 47''$  BT dan  $6^{\circ} 43' 26''$  -  $7^{\circ} 09' 43''$  LS. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak merupakan wilayah dengan beragam topografi berupa pantai dan dataran rendah. Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 0 meter sampai dengan 100 meter di atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 1.792,35 mm / tahun. Curah hujan terendah 1.072 mm / tahun sedangkan curah hujan tertinggi 2.467 mm / tahun. Suhu udara di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak rata-rata  $33^{\circ}$  -  $34^{\circ}$  Celsius ( Kabupaten Demak Dalam Angka, 1994 ).

Secara administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Demak memiliki batas-batas wilayah yaitu, (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dan Laut Jawa; (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Daerah Tingkat II Grobogan; (3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; dan (4) sebelah Barat berbatasan dengan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang.

## PETA JAWA TENGAH







Peta Kabupaten Dati II Demak

Menurut Buku Kabupaten Demak Dalam Angka (1994), luas wilayah keseluruhan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ialah 897,43 km<sup>2</sup>. Berdasarkan luas wilayah ini sesuai dengan data yang ada sampai dengan tahun 1994, tata guna lahannya terbagi atas areal permukiman/perumahan seluas 131,49 km<sup>2</sup> atau 14,65 %, areal tegalan seluas 151,02 km<sup>2</sup> atau 16,83 %, areal tambak seluas 46,28 km<sup>2</sup> atau 5,16 %, areal tebet / kolam / tambak seluas 0,33 km<sup>2</sup> atau 0,04 %, tidak diusahakan seluas 0,78 km<sup>2</sup> atau 0,09 %, areal hutan negara seluas 15,72 km<sup>2</sup> atau 1,75 %, areal sawah seluas 519,71 km<sup>2</sup> atau 57,82 % dan areal lainnya seluas 32,86 km<sup>2</sup> atau 3,66 %.

Secara administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Demak terdiri atas 4 pembantu Bupati, 13 kecamatan, 241 desa dan 6 kelurahan.

Keadaan penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak bersifat heterogen. Jumlah penduduknya sampai dengan tahun 1994 (data statistik terakhir yang ada) sekitar 807.015 jiwa. Dari jumlah tersebut tingkat kepadatan rata-rata 917 jiwa / km<sup>2</sup> dengan angka kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Wedung dan angka kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Demak. Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Demak memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Banyak warga Kabupaten Demak yang pergi keluar daerah baik secara sementara maupun secara permanen untuk keperluan mencari pekerjaan. Selain itu terdapat juga warga pendatang yang masuk ke wilayah Demak dengan tujuan dan alasan yang serupa. Pada umumnya alasan dari kedatangan atau perpindahan mereka adalah untuk keperluan usaha (termasuk bekerja), dan sebagian lainnya untuk kepentingan studi. Sedikit sekali perpindahan penduduk yang dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan di luar itu.

## **2.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi utama penelitian ini adalah di Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen. Sebagai lokasi utama kegiatan penelitian ini, Kelurahan Mranggen mempunyai tingkat heterogenitas penduduknya yang cukup tinggi, baik dilihat dari kewarganegaraan, pekerjaan, pendatang atau urban, agama, pengangguran, maupun jumlah rumah atau bangunan dan keanekaragaman bentuk fisik lainnya.

Secara administratif, kelurahan Mranggen termasuk salah satu desa dari sembilan belas di wilayah Kecamatan Mranggen. Kelurahan ini meliputi satu Dusun tujuh RW dan 64 RT. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bandungrejo dan Batusari Kecamatan Mranggen.
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Brumbung Kecamatan Mranggen.
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kembangan Kecamatan Mranggen.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kangkung Kecamatan Mranggen.

Keadaan topografi kelurahan Mranggen merupakan daerah dataran rendah bukan pantai dengan ketinggian tanah kurang lebih antara 0 - 16 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 - 3.000 mm / tahun.

Jarak kelurahan Mranggen ke Kantor Kecamatan Mranggen sekitar 0,006 kilometer, dan jarak ke Kantor Kabupaten sekitar 30,000 km sedangkan jarak ke Ibukota Propinsi Jawa Tengah sekitar 15,000 kilometer. Luas wilayah kelurahan Mranggen seluruhnya adalah 260.012 hektar, yang terbagi atas : pekarangan seluas 131.455 hektar ( 50,5 % ), tegalan seluas 126.457 hektar ( 48,6 % ) dan sisanya seluas 2.100 (0,9 % ) hektar meliputi sungai, jalan, kuburan, dan lain-lain.

### **2.2.1. Penduduk**

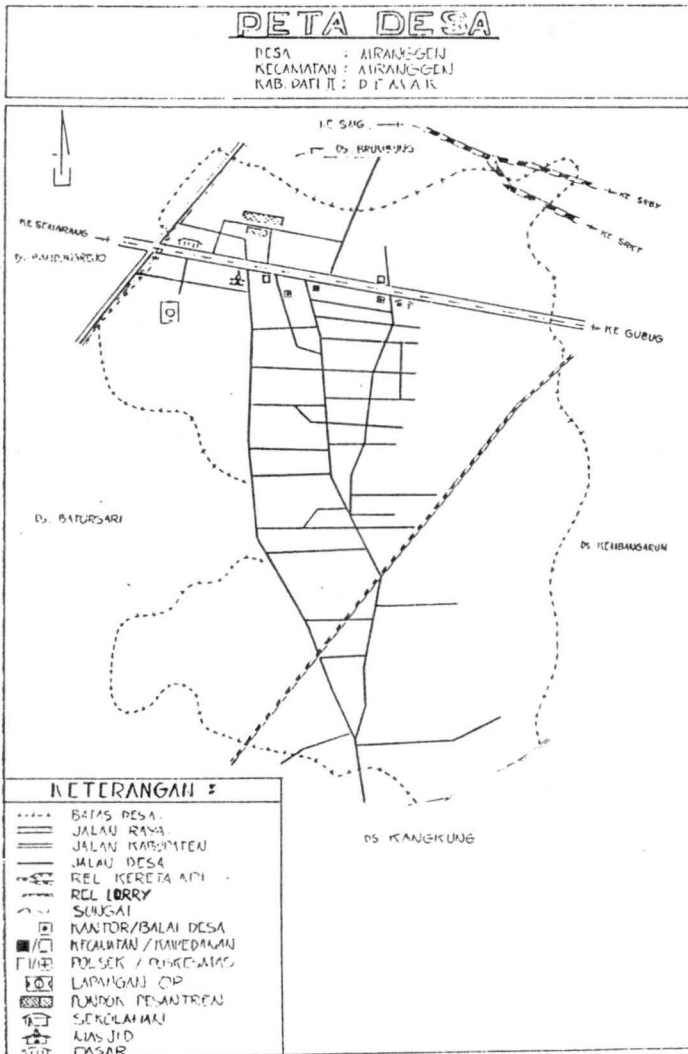
#### **a. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan mobilitasnya**

Berdasarkan data bulan Desember tahun 1994, jumlah keseluruhan penduduk di kelurahan Mranggen tercatat 8.198 jiwa. Jumlah kepala keluarga ( KK ) 2.043. Jumlah penduduknya sebanyak 8.198 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk kelurahan rata-rata sekitar 1626 jiwa / km dan tingkat perkembangan berkisar antara 1 sd 1,7 % km tiap tahunnya.

Perkembangan penduduk di kelurahan Mranggen pada dua tahun terakhir ( berdasarkan data statistik yang ada ), adalah : Untuk tahun 1992 - 1993 jumlah penduduk 8.098 jiwa yang meliputi laki-laki 3955

# PETA KECAMATAN MRANGGEN





**Peta Kelurahan Mranggen**

jiwa dan perempuan 4143 jiwa. Sedangkan untuk tahun 1993 - 1994 dengan jumlah penduduk 8198 jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan ialah 4022 jiwa penduduk laki-laki dan 4176 penduduk perempuan.

Tentang komposisi penduduk pada tahun 1994, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel I berikut ini :

Tabel I.

**KOMPOSISI PENDUDUK  
DILIHAT DARI UMUR DAN JENIS KELAMIN**

| Kelompok Umur | Laki-laki    | Perempuan    | Jumlah       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 1         | 244          | 252          | 296          |
| 2 - 5         | 279          | 487          | 966          |
| 6 - 7         | 217          | 226          | 443          |
| 8 - 12        | 490          | 498          | 988          |
| 12 - 15       | 264          | 272          | 536          |
| 15 - 25       | 774          | 783          | 1.557        |
| 25 - 45       | 1.045        | 1.068        | 2.113        |
| 45 - 55       | 312          | 304          | 616          |
| 55 keatas     | 197          | 286          | 483          |
| <b>Jumlah</b> | <b>8.198</b> | <b>4.022</b> | <b>4.176</b> |

Sumber : Monografi Kelurahan Mranggen 1994.

Mobilitas penduduk di Kelurahan Mranggen ini termasuk cukup tinggi. Agar lebih jelasnya dan terdapat kesepakatan, maka sebelum membicarakan tentang mobilitas penduduk lebih lanjut di Kelurahan Mranggen, maka perlu dikemukakan lebih dahulu di sini tentang apa yang dimaksud mobilitas penduduk itu. Menurut ilmu kependudukan mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas tidak permanen atau sirkulasi. Mobilitas permanen

maksudnya adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan tidak ada niat untuk kembali ke tempat semula.

Sedangkan yang dimaksud dengan mobilitas penduduk tidak permanen atau sirkulasi pada dasarnya adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain tetapi ada niat untuk kembali ke tempat semula (asal).

Dalam studi ini yang dimaksud mobilitas penduduk adalah dalam pengertian yang terakhir, yaitu mobilitas yang tidak diartikan sebagai perpindahan penduduk secara permanen atau yang disebut juga perpindahan penduduk yang tidak mempunyai niat untuk kembali ke tempat asalnya. Sebab, meskipun banyak penduduk yang pergi ke luar daerah dan bertempat tinggal (mondok / kost / kontrak) di tempatnya yang baru karena alasan pekerjaan, mereka tetap saja kembali ke tempat asalnya (ke kampung halamannya).

Perpindahan penduduk dari luar daerah atau kelurahanlain ke kelurahan Mranggen yang paling menonjol adalah karena alasan "melaksanakan usaha" atau pekerjaan. Mobilitas penduduk Kelurahan Mranggen dalam mencari / bekerja di kota-kota lain seperti jakarta, Semarang, Kudus maupun Kendal memiliki tingkat yang tinggi. Perpindahan penduduk tersebut sebagian ada yang bersifat permanen, sebagian lain sementara dan yang lain adalah laju.

## **b. Mata Pencaharian dan Pendidikan**

Berdasarkan data monografi kelurahan Mranggen tahun 1993/ 1994, secara garis besar perbandingan jenis mata pencaharian penduduknya dapat digambarkan bahwa : penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh berjumlah 1.414 orang yang meliputi buruh tani sebanyak 469 orang dan buruh industri sebanyak 442 orang serta buruh bangunan sebanyak 503 orang; petani sebanyak 190 orang, petani penggarap sebanyak 205 orang, pengusaha industri sejumlah 22 orang. Disaming itu sebagai pedagang sebanyak 334 orang, pegawai negeri sebanyak 136 orang, ABRI sejumlah 85 orang, pensiunan sejumlah 66 orang dan lain-lain sebanyak 254 orang. Data yang lebih rinci lihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.  
**PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN**  
 1991 / 1992

| Jenis mata pencaharian | Frekuensi    | %             |
|------------------------|--------------|---------------|
| Pengusaha              | 22           |               |
| Buruh Industri         | 442          |               |
| Buruh Bangunan         | 503          |               |
| Pedagang               | 334          |               |
| Pengangkutan           | -            |               |
| Pegawai Negeri / ABRI  | 221          |               |
| Pensiunan              | 66           |               |
| Lain - lain            | 254          |               |
| <b>J u m l a h</b>     | <b>1.831</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Monografi Kelurahan Mranggen 1994

Dari data pada tabel II.2 di atas diketahui bahwa sekitar separo dari angkatan kerja yang ada di lokasi penelitian adalah para buruh industri dan bangunan. Buruh yang pertama sifat pekerjaannya lebih mantap, artinya tingkat kelangsungannya lebih panjang dan menetap, sedangkan buruh katagori kedua sifat pekerjaannya tidak mantap, artinya sewaktu-waktu dapat berhenti bekerja baik karena pekerjaannya yang sudah selesai atau karena tidak dipakai lagi. Selain itu lokasi pekerjaannya selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik di wilayah kelurahan setempat maupun luar kelurahan dan kadang luar kecamatan ataupun kota.

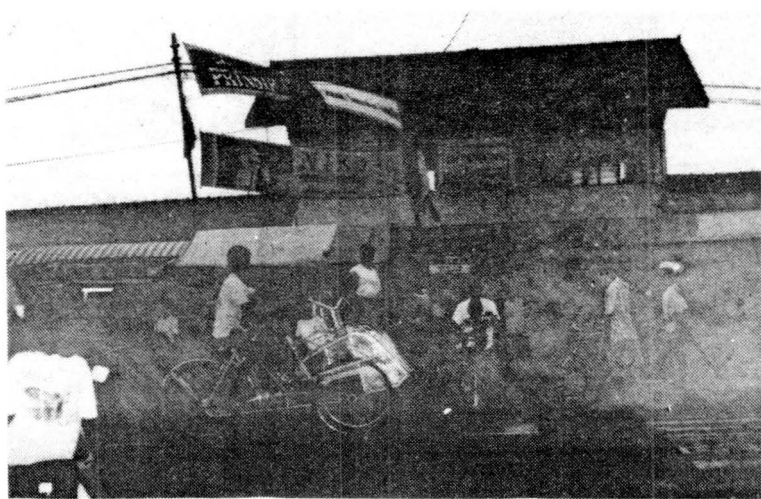


Dari data pada tabel 2. di atas juga dapat diketahui bahwa cukup banyak warga masyarakat yang menjadi pedagang dan juga bekerja pada sektor-sektor lain. Untuk memperkuat data tersebut, berikut ini disajikan data tentang sarana perdagangan dan sektor-sektor lain tersebut di kelurahan Mranggen.

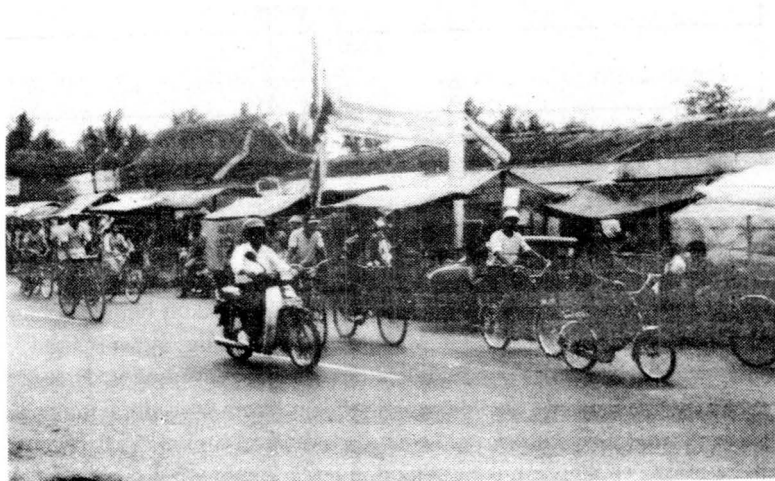
Tabel 3.  
**SARANA PERDAGANGAN DAN SEKTOR LAIN  
DI KELURAHAN MRANGGEN 1994**

| No.         | S a r a n a          | J u m l a h |
|-------------|----------------------|-------------|
| 1.          | Toko / Kios          | 111         |
| 2.          | Warung               | 22          |
| 3.          | Home Industri        | 20          |
| 4.          | Bengkel Sepeda       | 9           |
| 5.          | Bengkel Sepeda Motor | 7           |
| 6.          | Bengkel Mobil        | 2           |
| 7.          | Reparasi Radio / TV  | 3           |
| J u m l a h |                      | 174         |

Sumber : Data Kelurahan Mranggen 1994



Gbr. 3. 1 Pasar dan Kompleks Pertokoan



Gbr. 3. 2 Deretan Pedagang Kaki Lima

Tabel 4.

**PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
1993 / 1994**

| Tingkat Pendidikan               | Frekuensi | %      |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Tamat Akademi / Perguruan Tinggi | 67        | 0,81   |
| Tamat SLTA                       | 388       | 4,73   |
| Tamat SLTP                       | 1.109     | 13,53  |
| Tamat SD                         | 2.520     | 30,73  |
| Belum Tamat SD                   | 1.743     | 21,26  |
| Tidak Tamat SD                   | 600       | 7,37   |
| Tidak Sekolah                    | 530       | 6,46   |
| J u m l a h                      |           | 100,00 |

Sumber : Monografi Kelurahan Mranggen Tahun 1994

Dari data pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Mranggen telah mengenyam pendidikan, baik di Sekolah Dasar maupun di tingkat yang lebih tinggi. Hanya ada 6,46 persen yang tidak sekolah. Untuk ukuran kota prosentase yang tidak sekolah ini nampak cukup tinggi. Akan tetapi kalau kita lihat dari jenis mata pencaharian penduduk dan letak lokasi kelurahan Mranggen yang termasuk daerah pinggiran dan merupakan daerah urban, maka angka tersebut wajar dan dapat dimaklumi.

Tabel 5

**JUMLAH PRASARANA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DLL.  
1993 / 1994**

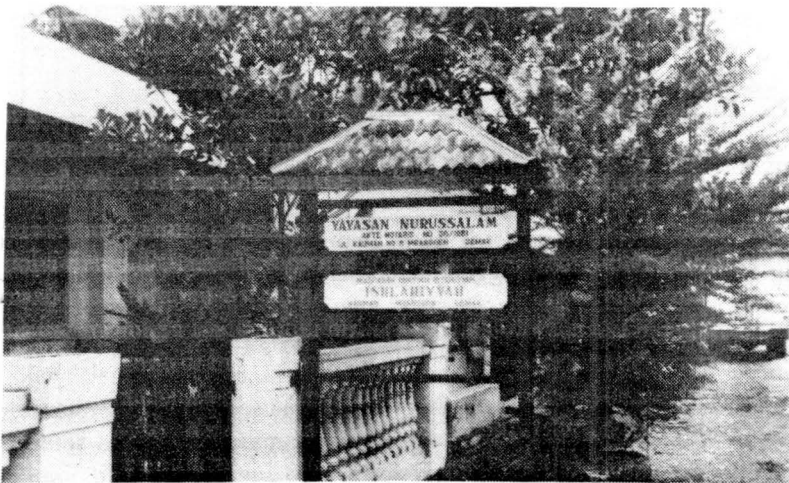
| Jenis Prasarana  | J u m l a h |
|------------------|-------------|
| S D              | 5           |
| SLTP             | 2           |
| Madrasah         | 9           |
| Pondok Pesantren | 2           |
| Posyandu         | 7           |
| Rumah Bersalin   | 1           |
| Gardu Jaga       | 25          |
| Musholla         | 29          |
| Gereja           | -           |
| Masjid           | 6           |
| Jumlah           | 84          |

Sumber : Data Kelurahan Mranggen 1994

Dari data pada Tabel 5 di muka, nampak bahwa sarana pendidikan yang ada di kelurahan Mranggen cukup bervariasi karena ada Sekolah Dasar Negeri, Madrasah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Hanya saja untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Kejuruan di Kelurahan Mranggen ini belum ada, sehingga anak-anak dari kelurahan Mranggen untuk bersekolah pada tingkat SLTA harus pergi ke wilayah lain, tetapi hal ini bukanlah masalah, karena selain lokasinya tidak jauh, sarana transportasinya juga tidak sulit, baik transportasi konvensional seperti becak, andong, sepeda maupun transportasi modern seperti sepeda motor dan colt umum.



Gbr. 2.3 Salah satu SLTP di Mranggen



Gbr. 2.4 Salah satu Madrasah di Mranggen



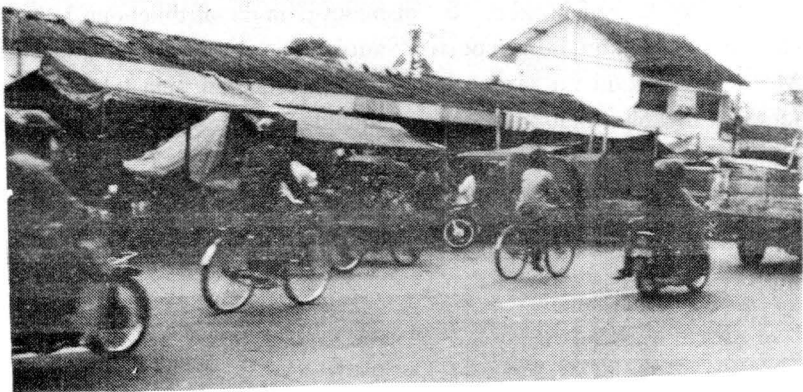
Gbr. 2.5 Salah Satu Pondok Pesantren

Dari data pada tabel 5 di muka juga dapat diketahui bahwa sarana pendidikan lain seperti Pondok Pesantren juga terdapat di Mranggen. Selain itu sarana lain seperti kesehatan juga telah cukup tersedia di kelurahan Mranggen. Sedangkan sarana transportasi dan komunikasi yang ada akan disajikan dalam tabel 6

Tabel 6.  
**SARANA TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI  
 DI MRANGGEN**

| No. | Jenis Sarana yang ada  | J u m l a h |
|-----|------------------------|-------------|
| 1.  | T r u k                | 12 buah     |
| 2.  | C o l t                | 24 buah     |
| 3.  | Sepeda Motor           | 134 buah    |
| 4.  | Sepeda                 | 327 buah    |
| 5.  | Dokar / Andong         | 55 buah     |
| 6.  | Becak                  | 6 buah      |
| 7.  | Telepon                | 5 buah      |
| 8.  | Handy Transifer ( HT ) | 2 buah      |
| 9.  | R a d i o              | 325 buah    |
| 10. | Televisi               | 374 buah    |
|     | J u m l a h            | 1.264 buah  |

Sumber : Data Kelurahan Mranggen 1994



Gbr.2.6 Beberapa alat Transportasi yang ada Becak, Sepeda, Sepeda Motor, Truk, Colt.

### 2.2.2. Latar Belakang Sosial Budaya

Potret sosial budaya masyarakat di Kelurahan Mranggen pertama-tama dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tata pergaulan ini bahasa yang digunakan sangat penting untuk diketahui. Sebab dengan pengungkapan masalah bahasa di sini selain sebagai alat komunikasi yang paling efektif di dalam masyarakat, tetapi juga ada hubungannya dengan tata kelakuan di lingkungan pergaulan warganya. Seperti diketahui dalam pemakaian bahasa Jawa perlu diperhatikan tingkat-tingkat penggunaannya. Bahasa sehari-hari penduduk di daerah penelitian, terutama dalam suasana yang tidak resmi, adalah bahasa *Jawa ngoko*. Bahasa ini banyak dipakai (diucapkan) oleh orang-orang yang sepadan umurnya, atau sesama teman yang sudah akrab.

Selain bahasa Jawa ngoko, sebagai alat komunikasi digunakan juga bahasa *Jawa krama*. Bahasa Jawa krama ini ada tingkat-tingkatnya seperti *krama andhap*, *krama madya*, dan *krama hinggil*. Penggunaannya sangat tergantung pada siapa yang dihadapi. Semakin dihormati yang diajak bicara, semakin lembut tutur kata dan semakin sopan tingkah lakunya. Bila seseorang menegur atau ditegur orang yang belum dikenal baik atau baru dikenal, praktis akan menggunakan bahasa Jawa krama, sebagai penghormatan. Apabila seseorang menghadapi orang yang amat dihormati maka otomatis akan menggunakan bahasa Jawa krama hinggil. Jelasnya dengan bahasa yang dipakai, apalagi dengan dilengkapi dengan tutur kata dan sikap serta tingkah lakunya, maka akan dapat diketahui tingkat pergaulan mereka, atau siapa yang menghormati atau dihormati. Di dalam kenyataannya, khususnya apabila mereka berbahasa kromo, bahasa yang mereka gunakan telah menyimpang dari bahasa Jawa standart yaitu bahasa Jawa yang digunakan oleh orang-orang di daerah kasultanan dan kasunanan Yogyakarta dan Surakarta. Sebagai indikator dari penyimpangan adalah digunakannya kata kerja yang **dikromohinggilkan** untuk dirinya sendiri. Bahasa Indonesia pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, khususnya di sekolah-sekolah, tetapi dalam pertemuan-pertemuan seperti dalam sarasehan atau pertemuan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, dusun, RT, dan RW masih sering juga menggunakan bahasa Jawa (campuran).





Gbr. 2.7 Suasana dalam pertemuan warga dimana bahasa yang digunakan campuran.

Untuk dapat melihat secara jelas serta menghayati peranan dalam tata kelakuan kehidupan masyarakat, selain apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat pula dari sistem kemasyarakatannya melalui kesatuan kekerabatan yang ada, stratifikasi sosial dan komunitasnya.

#### a. Kesatuan Kekerabatan

Istilah kesatuan kekerabatan, dalam ilmu antropologi sering disebut sebagai kelompok kekerabatan atau *kingroup* yang diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan manusia yang terikat oleh unsur-unsur tertentu, terutama ikatan kekerabatan, baik karena hubungan darah (keturunan) maupun karena hubungan perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat, bentuk *kingroup* yang pertama-tama dapat dilihat adalah keluarga inti atau *nuclear family*. Suatu keluarga

inti biasanya anggotanya terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan anak angkat yang secara resmi mempunyai hak wewenang yang kurang lebih sama dengan anak sesungguhnya, dapat dianggap sebagai anggota keluarga inti (Koentjaraningrat, 1981).

Fungsi keluarga inti yang menonjol di kelurahan tempat penelitian ini dilakukan adalah merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan, sekalipun ada juga yang hanya menumpang dan ikut makan pada keluarga inti yang lain, misalnya keluarga inti yunior (anak) numpang pada keluarga inti senior (orang tua).

Selain keluarga inti terdapat pula keluarga luas atau *extended family*, yaitu salah satu bentuk kesatuan kekerabatan yang ikatan hubungan kekerabatannya diperhitungkan melalui satu tokoh atau satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan, atau berprinsip *ego oriented kingroup*. Salah satu ciri keluarga luas adalah selalu terdiri dari satu keluarga inti, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan sosial yang amat erat dan biasanya hidup tinggal bersama dalam satu tempat tinggal (rumah), atau pada satu pekarangan (Koentjaraningrat, 1981).

Kelompok kerabat di luar keluarga inti tersebut, sering disebut juga dengan istilah *sanak sedulur*, yaitu semua orang yang masih ada hubungan kerabat dengan ego. Namun demikian harus pula dibedakan antara *sedulur cedak* (saudara dekat) dan *sedulur adoh* (saudara jauh). Saudara dekat adalah mereka yang termasuk di dalam hubungan kekerabatan dua tingkat ke atas dan dua tingkat ke bawah dari ego.

Dalam sistem kekerabatan seperti tersebut di atas, dikenal istilah-istilah kekerabatan yang diklasifikasikan berdasarkan generasi (keturunan) yang berjumlah sepuluh generasi ke atas dan sepuluh generasi ke bawah. Istilah-istilah tersebut yaitu :

- (1) Generasi ke atas meliputi : wong tuwo (orang tua), embah, buyut (embah buyut), canggah (embah canggah), wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak sente, debog bosok dan galih asem.
- (2) Generasi ke bawah meliputi : anak, putu (wayah/cucu), buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak sente, debog bosok dan galih asem.

Kedua generasi tersebut, mengenal beberapa istilah kekerabatan untuk menyebutkan seseorang di dalam kelompok kerabatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

- (1) Istilah simbah, embah, pak tuwa, kakek, diberikan untuk menyebut orang tua laki-laki ayah atau ibu (ayahnya ayah / ibu).
- (2) Istilah simbah, embah, mbok tuwa, nenek, mbah wedok, diberikan untuk memanggil orang tua perempuan ayah atau ibu ( ibunya ayah / ibu).
- (3) Istilah ipe, untuk menyebut adik, kakak laki-laki / perempuan dari istri / suaminya.
- (4) Istilah Peripean, untuk menyebut hubungan antara saudara laki-laki / perempuan dengan saudara laki-laki / perempuan dari istri atau suaminya.
- (5) Istilah de atau uwa, untuk menyebut kakak laki-laki maupun perempuan ayah atau ibu.
- (6) Istilah Lik, untuk menyebut adik laki-laki maupun perempuan ayah maupun ibu.

Adat menetap sesudah menikah yang berlaku di lokasi penelitian ini pada umumnya adalah *adat utrolokal*, yaitu adat yang memberikan kebebasan kepada pengantin baru untuk menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau istri menurut situasi dan kondisi kemampuan keluarganya. Setelah menikah, maka biasanya mempelai tinggal di rumah orang tua baik wanita maupun laki-laki untuk sementara waktu, sebelum mereka mampu membangun rumah sendiri. Oleh karena itu, bentuk keluarga luas yang terjadi pada umumnya adalah *keluarga luas utrolokal*, yang terdiri dari satu keluarga inti dari anaknya. Bentuk keluarga luas semacam ini pada umumnya sifatnya hanya sementara, artinya pada suatu saat keluarga inti baru itu akan memisahkan diri jika sudah mampu atau karena kepentingan lain.

Sistem kekerabatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, tidak berbeda dengan daerah-daerah di Jawa yang lain pada umumnya. Kaum kerabat disebut *sedulur* dalam bahasa Jawa. Pada dasarnya sistem kekerabatan orang Jawa adalah bilateral, yaitu prinsip yang menghubungkan kekerabatan melalui orang laki-laki dan orang

perempuan. Rumah tangga dalam keluarga batih (sumah) terdiri dari suami istri dan anak-anaknya yang belum kawin, atau mungkin ditambah dengan saudara-saudara dari pihak istri, pihak suami atau suami serta istri dari anak-anaknya. Biasanya mereka memasak dalam satu dapur, atau dengan kata lain urusan ekonomi rumah tangga ditanggung secara bersama-sama dan diorganisir oleh kepala rumah tangganya.

Ayah (suami) bertindak sebagai kepala rumah tangga, tetapi bersama ibu (istri) sama-sama mengemudikan jalannya rumah tangga dan saling mempunyai tanggung jawab sesuai dengan hak serta kewajiban yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Mereka (suami-istri, ayah-ibu) juga mengelola harta benda, baik harta benda bawaan maupun harta benda yang diperoleh setelah mereka menikah atau harta pendapatan bersama-sama.

Peranan ayah yang khusus terjadi dalam perkawinan anak gadisnya. Untuk sahnya perkawinan seorang anak perempuan menjadi istri harus ditunjuk seorang wali yang biasanya dilakukan oleh ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka sebagai gantinya haruslah salah seorang anak laki-laki ayahnya yang tertua. Bila tidak ada, dapat dilakukan oleh saudara laki-laki ayahnya, yang biasanya disebut "pancer wali". Dengan demikian wali harus seorang laki-laki dari kerabat ayahnya (suami). Namun status sebagai kepala somah tidak selalu diduduki oleh ayah (suami). Bila terjadi beberapa sebab misalnya suami bekerja di perantauan, maka kepala somah diperankan oleh ibu (istri). Lain halnya bila ayah (suami) meninggal dan mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka status kepala somah dipegang oleh anak laki-laki tersebut.

## **b. Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial adalah suatu sistem pelapisan masyarakat yang berstruktur. Tentang pelapisan sosial ini, di lokasi penelitian memang ada tetapi tidak begitu tajam. Unsur yang membedakan lapisan-lapisan sosial tersebut bermacam-macam, misalnya keturunan bangsawan, pemegang kekuasaan, juga pendidikan. Prinsip keturunan bangsawan di sini terutama dipengaruhi oleh sistem kraton Jawa. Lapisan bangsawan dianggap menduduki status yang cukup tinggi sehingga dihormati (tetapi di lokasi penelitian, kelompok ini sedikit sekali, hanya satu dua).

Pemegang kekuasaan yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin formal dan informal. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok ini beserta keluarganya, sekalipun bukan merupakan lapisan sosial yang resmi, tetapi oleh penduduk dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan disegani dalam pergaulan.

Di lokasi penelitian, kepandaian dalam ilmu juga dianggap sebagai alasan untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Dengan demikian golongan orang-orang pandai dan keluarganya (misalnya guru, dosen, pemuka agama, pegawai negeri, dan lain-lain) dianggap menduduki lapisan sosial yang cukup tinggi, karena mereka mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam prakteknya bisa saja terjadi kombinasi antara keturunan bangsawan, pemegang kekuasaan dan pendidikan, bahkan sering dikaitkan pula dengan kekayaan harta benda.

### **C. Komunitas**

Komunitas adalah kesatuan hidup setempat di mana setiap warga merasa terikat pada suatu tempat. Di sini secara khusus membicarakan suatu komunitas kecil yaitu kelurahan, yang di antara warganya biasanya saling mengenal. Bentuk kelurahan yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan. Terdiri dari unit-unit pemukiman yang disebut dukuh. Aktivitas yang menyangkut kehidupan masyarakatnya antara lain meliputi gotong royong baik untuk kepentingan bersama maupun kepentingan pribadi secara bergiliran seperti kegiatan bersama yang bersangkutan paut dengan kematian, kerja bakti, kegiatan upacara adat bersih desa, dan lain-lain.

Dalam komunitas kelurahan, struktur kelurahannya diurus oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari kepala kelurahan, kepala bagian umum, kepala bagian sosial, kepala bagian agama, kepala bagian keamanan, dan pembantu-pembantu lainnya yang langsung di bawah kecamatan dan membawahi pedukuhan-pedukuhan.

#### **2.2.3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk melihat tingkat kesejahteraan warga masyarakat di Kelurahan Mranggen berikut ini akan dipaparkan beberapa indikator

yang berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator tersebut meliputi tingkat pendapatan penduduk, tingkat konsumsi beras, tingkat gizi masyarakat, tingkat kesehatan rumah masyarakat, tingkat kebersihan masyarakat, tingkat kebutuhan air bersih, tingkat kebutuhan fasilitas listrik, tingkat melek huruf, tingkat kemandirian penduduk, dan tingkat pengangguran. Gambaran umum secara menyeluruh ini secara sederhana dapat untuk melihat bagaimanakah kesejahteraan warga masyarakat di kelurahan Mranggen. Adapun gambaran singkat tentang indikator-indikator tersebut akan diuraikan berikut ini.

#### **a. Tingkat Pendapatan Penduduk**

Jumlah penduduk di kelurahan Mranggen secara keseluruhan adalah sebanyak 8.198 jiwa dengan usia kerja sebanyak 3.936 jiwa. Untuk menghitung pendapatan penduduk bertitik tolak dari perhitungan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Dari dasar tersebut setelah dihitung, ternyata pendapatan percapita penduduk kelurahan Mranggen pada tahun 1992 sebesar Rp. 780,- / orang / hari. Sedangkan untuk tahun 1993 sebesar Rp. 840,- / orang / hari. Jadi ada peningkatan Income percapita warga kelurahan Mranggen sebesar 7,05 %.

#### **b. Tingkat Konsumsi Beras**

Jika ditinjau dari jumlah penduduk yang sebesar 8.198 jiwa dan setiap hari per jiwa rata-rata mengkonsumsi beras sebanyak sekitar 0.45 kg / hari, maka beras yang dibutuhkan adalah sebanyak 3607,12 kg / hari. Sehingga kebutuhan beras dalam satu tahun adalah 1.298.563,20 kg. Jumlah ini ternyata secara rata-rata (umum) dapat terpenuhi, sehingga tidak ada warga yang kekurangan dalam mengkonsumsi beras. Atau dengan kata lain masalah konsumsi beras ini tidak ada masalah.

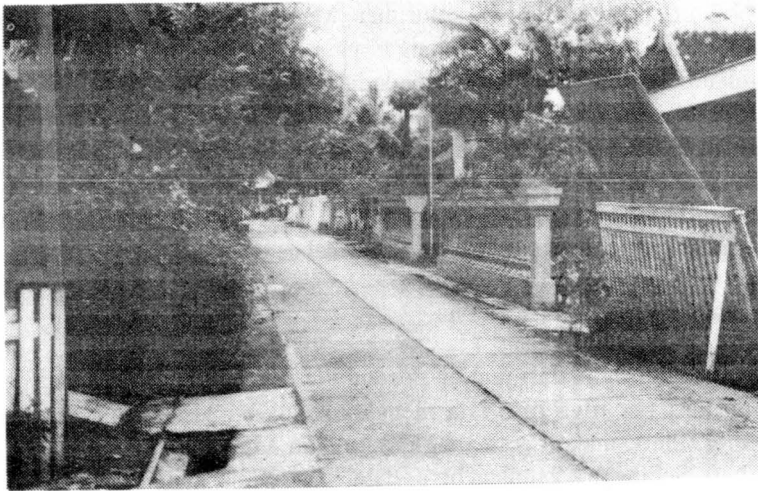
#### **c. Tingkat Gizi Masyarakat**

Dilihat dari jumlah balita sebanyak 1426 anak yang sehat, dan dari kegiatan 7 (tujuh) posyandu yang ada di kelurahan Mranggen menunjukkan bahwa balita yang ada yang aktif datang menimbang ada sebanyak 990 anak. Dari perkembangan yang terpantau dari jumlah

itu gizinya cukup baik. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat Gizi di kelurahan Mranggen sudah terpenuhi.

#### **d. Tingkat Kesehatan Rumah Masyarakat**

Di kelurahan Mranggen terdapat sekitar 2004 buah rumah penduduk dengan rincian : rumah tembok sebanyak 564 buah, rumah dengan kondisi setengah tembok sebanyak 850 buah, rumah dengan kondisi kayu / papan sebanyak 500 buah, dan rumah dengan kondisi bambu / gedeg sebanyak 90 buah. Kemudian kategori typologi rumah Type A sebanyak 564 buah, type B sebanyak 850 buah, dan type C sebanyak 590 buah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan rumah masyarakat sudah cukup baik.



Gbr. 2.8 Salah satu kondisi rumah dan lingkungan.

#### **e. Tingkat Kebersihan Masyarakat**

Dilihat dari jumlah rumah sehat yang ada, dan kesadaran masyarakat kelurahan Mranggen cukup tinggi. Untuk tiap-tiap rumah penduduk telah tersedia tempat sampah, dan tersedia juga tempat pembuangan sampah. Dan dari pengamatan peneliti nampak bahwa jalan-jalan kecil (gang) nampak bersih. Meskipun belum semua gang (jalan kecil) di beton.

#### **f. Tingkat Kebutuhan Air Bersih**

Desa seluas 260,012 Ha dan dihuni oleh 8.198 orang yang terdiri dari 2.043 Kepala Keluarga, telah memiliki sumur sebanyak 1714 tempat. Walaupun belum ada sumur artesis namun dengan adanya sarana air tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan air penduduk. Hanya saja di musim kemarau sumur-sumur tersebut banyak yang kering, hanya beberapa sumur saja yang airnya masih cukup untuk dikonsumsi. Jadi dengan demikian dari segi ini pemenuhan kebutuhan hidup berupa air bersih di kelurahan Mranggen dapat dikatakan masih kurang, khususnya pada musim kemarau.

#### **g. Tingkat Kebutuhan Fasilitas Listrik**

Sejak tahun 1979 kelurahan Mranggen telah menikmati aliran listrik dari PLN jaringan Semarang. Kapasitas aliran listrik di Mranggen mencapai antara 250 Volt sampai dengan 1200 Volt. Jumlah pelanggan atau pemakai jasa listrik di Kelurahan Mranggen ada sejumlah sekitar 1920 rumah. Pembayaran listrik tiap bulannya dilakukan melalui Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) yang ada di Kecamatan Mranggen. Pengembangan jaringan listrik di kelurahan ini cukup baik, dan selama ini belum pernah terjadi gangguan yang berarti, demikian pula selama ini belum pernah ada kecelakaan akibat penggunaan listrik tersebut. Pengaruh positif akibat adanya penerangan listrik ini sangat dirasakan oleh masyarakat baik di bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### **h. Tingkat Melek Huruf**

Dalam hal tingkat melek huruf, di kelurahan Mranggen cukup menggembirakan. Penanganan sisa garapan B3B yang sudah terdata menjadi program lanjutan dari Kejar Paket A, LKMD, dan Perangkat Desa dalam rangka menuju ke arah Ujian Persamaan Sekolah Dasar (Uper SD). Anak wajib belajar semuanya dapat tertampung di kelurahan Mranggen pada Sekolah Dasar, SLTP serta SLTA yang ada. Walaupun ada pula yang bersekolah di luar Kelurahan atau Kecamatan Mranggen seperti (paling banyak) ke Kotamadia Semarang.



### **i. Tingkat Kemandirian Penduduk**

Usia penduduk dari 10 sampai 55 tahun di kelurahan Mranggen yang berjumlah cukup banyak dan mereka kebanyakan bekerja di luar wilayah kelurahan Mranggen, sehingga mata pencahariannya tidak tergantung pada pertanian saja. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian (dalam hal memperoleh pekerjaan) bagi warga penduduk kelurahan Mranggen cukup baik.

### **j. Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran di kelurahan Mranggen dapat dikatakan sangat kecil. Hal ini dikarenakan warga masyarakat kelurahan Mranggen mau bekerja di sektor apa saja yang dapat menampung tenaga mereka. Di luar mereka yang bekerja di bidang pertanian, banyak diantara mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Apalagi letak kelurahan Mranggen yang dekat dengan Kotamadia Semarang, sehingga tidak menutup kemungkinan angkatan kerja yang ada di kelurahan Mranggen sudah dapat tertampung di perusahaan-perusahaan maupun pada proyek-proyek pembangunan di kotamadia Semarang. Bahkan bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, di saat musim penghujan setelah mereka menggarap kebun mereka, secepatnya pergi boro untuk mencari pekerjaan di luar kelurahan mereka.

### **2.2.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Pembangunan sebagaimana diketahui memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Oleh karena itu untuk mengetahui partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat kelurahan Mranggen hanya akan dipaparkan beberapa sektor keterlibatan masyarakat yang cukup menonjol dan riil yang meliputi : partisipasi dalam swadaya pendanaan dalam pembangunan, partisipasi dalam kegiatan posyandu, partisipasi dalam program Keluarga Berencana, partisipasi dalam peningkatan pertanian, dan partisipasi dalam penataran P-4.

Perlu diketahui bahwa Kelurahan Mranggen termasuk salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Mranggen yang tidak mempunyai dana yang berasal dari Bando Desa

(Pendapatan Asli Desa), karena hanya mengandalkan dana swadaya yang berasal dari sumbangan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku (pologoro) dan sumbangan administrasi Pemerintahan Desa. Dua bentuk sumbangan ini selama ini dapat berjalan dengan cukup baik dan lancar. Namun demikian Pemerintah Desa bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Mranggen bertekad untuk lebih meningkatkan langkah-langkah kongkrit guna melaksanakan pembangunan di segala bidang. Untuk itu banyak kegiatan pembangunan dilaksanakan atas dana swadaya masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan yang berhasil dilaksanakan atas swadaya masyarakat tersebut di antaranya adalah : pemasangan neonisasi, pengerasan jalan dan saluran, penghijauan (bunga bugenfil), rehab betonisasi jalan, rehab gapura, pembangunan gapura di Pondok Majapahit, lanjutan pembangunan Masjid "baitul Mutaqim". Selanjutnya dengan melihat berbagai hasil pembangunan atas swadaya masyarakat ini, boleh dikatakan kelurahan Mranggen termasuk kelurahan yang dengan gigih terus berupaya memacu gerak langkah pembangunan manusia seutuhnya. Dan, dalam hal ini partisipasi masyarakat selama ini menunjukkan hal yang sangat mengembirakan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan gizi anak-anak di kelurahan Mranggen juga cukup mengembirakan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berjalannya secara aktif 7 Posyandu. Dalam kegiatan posyandu ini selain masalah gizi juga dapat mencakup masalah KIA, KB, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi ( BCG, DPT, Polio, dan Campak ). Semuanya ini jelas mencerminkan kesadaran masyarakat yang cukup baik akan arti pentingnya kesehatan di kelurahan Mranggen.

Dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan penghasilan masyarakat, serta perkembangan perekonomian di kelurahan Mranggen telah diambil langkah-langkah positif guna menurunkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi. Langkah-langkah yang diambil tersebut dilaksanakan dengan jalan mengintensifkan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan di seluruh pelosok wilayah kelurahan Mranggen. Dengan pertimbangan dasar-dasar dan nilai-nilai agama serta didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, maka banyak di antara mereka khususnya Penduduk Usia Subur ( PUS ) melaksanakan dan sekaligus

menjadi peserta program Keluarga Berencana secara mantap. Usaha ini diikuti pula dengan tetap memotivasi akseptor KB yang lama dan mereka yang sudah terlanjur keluar, tentang akseptor KB yang aktif, hampir segala bentuk alat kontrasepsi digunakan secara bervariasi seperti kontrasepsi IUD, Pil, Suntik, operasi (MOP), operasi (MOW), pasangan susuk / inplant, dan kondom. Partisipasi masyarakat, pemuda dan tokoh-tokoh agama (tentang peranan tokoh agama akan lebih dirinci pada bab selanjutnya) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana ini cukup baik dan menunjang. Pembinaan dan pelaporan kegiatan terus dilaksanakan secara rutin, dan setiap bulannya selama dapat berjalan secara lancar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) di kelurahan Mranggen sudah nampak baik dan mulai berhasil dengan baik pula.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian juga nampak cukup baik. Meskipun di kelurahan Mranggen tidak mempunyai sawah, karena yang ada hanyalah merupakan tanah tegalan, tetapi semangat warga masyarakat untuk bertani tegalan cukup baik. Ini terbukti bahwa tegalan yang ada semua berusaha ditanami dengan tanaman yang cocok dan menghasilkan. Yang jelas bahwa potensi apapun yang ada dan dimiliki berusaha dimanfaatkan semaksimal mungkin selagi hal itu bisa dilakukan.

Dalam rangka ikut menyebarluaskan dan membudayakan ideologi Pancasila, pelaksanaan program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kelurahan Mranggen berusaha secara nyata dengan mengembangkan berbagai kegiatan seperti : mengikutsertakan warga masyarakat dalam penataran P-4, baik yang dilaksanakan dengan dana pemerintah maupun dengan dana swadaya desa / kelurahan. Secara rinci di kelurahan Mranggen telah ada 6 orang yang telah mengikuti penataran P-4 Type A, 146 orang yang mengikuti penataran P-4 Type B, 10 orang telah mengikuti penataran P-4 Type C, 82 orang telah mengikuti penataran P-4 pola 17 jam, dan 100 orang yang telah mengikuti penataran P-4 pola 25 jam. Kegiatan lainnya adalah mengusahakan penambahan kader Pancasila untuk desa / kelurahan dalam rangka mengembangkan kelompok permainan simulasi P-4 di tingkat kelurahan. Di kelurahan Mranggen telah ada 25 orang Kader Pancasila, 42 orang fasilitator P-4, 47 kelompok Permainan Simulasi P-4, dan 15 kelompok Pengajian. Kegiatan permainan Simulasi P-4, dan 15

kelompok Pengajian. Kegiatan permainan Simulasi P-4 dilaksanakan paling sedikit satu bulan sekali oleh tiap-tiap kelompok dengan jadwal yang berlainan, sehingga monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh tingkat Desa (KP2S) maupun tingkat Kecamatan Mranggen (BP2S). Selain itu dalam kehidupan sehari-hari juga berusaha untuk mengamalkan perilaku manusia Pancasila, hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat kelurahan Mranggen yang rukun, damai, tenteram. Sampai sekarang ini penggarapan masyarakat guna ikut di dalam penataran P-4 terus dilakukan dengan pendataan yang lebih teliti.

---

### **BAB III**

## **PARTISIPASI ULAMA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA**

Telah dikemukakan di muka bahwa Ulama memiliki peran dan kedudukan yang penting dan strategis dalam pembangunan sosial budaya. Demikian juga peran dan kedudukan ulama di Kelurahan Mranggen. Seperti diketahui bersama, bahwa dalam kehidupan sosial budaya, ulama dapat menjalankan fungsi sebagai pengendali atau kontrol dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dapat dikatakan kedudukan ulama sejajar dengan pemimpin formal bahkan tidak jarang masyarakat menganggapnya lebih tinggi dari pemimpin formal dan menjadikan mereka sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Segala aktivitas para ulama sehari-hari pada umumnya diikuti oleh kelompok masyarakat di bawahnya. Masyarakat menerimanya sedemikian rupa, sehingga sering tanpa reserve, koreksi apakah semua yang dijalankan para ulama itu benar atau menyimpang. Dengan demikian jelaskan bahwa ulama memiliki kedudukan yang penting dan terhormat di hati masyarakat, sehingga kelompok-kelompok ini dalam kegiatan pembangunan diharapkan dapat berperan yang sangat besar. Sebagai golongan yang sangat dihormati dan menjadi panutan masyarakat, tentu para ulama dapat menerima informasi-informasi pembangunan secara terbuka untuk selanjutnya ditransformasikan secara konkrit agar dapat dijalankan dan diikuti

oleh umatnya. Oleh karena itu peran dan partisipasi ulama dalam pembangunan secara umum dan khususnya di bidang sosial budaya memiliki arti dan peran yang strategis. Secara umum partisipasi sebagai salah satu bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1993), pembangunan masyarakat dalam aspek sosial budaya mencakup sebelas bagian, yaitu : (1) kesejahteraan, (2) pendidikan, (3) kebudayaan, (4) kesehatan, (5) keluarga sejahtera, (6) kependudukan, (7) anak dan remaja, (8) pemuda, (9) peranan wanita, (10) perumahan dan pemukiman, dan (11) olah raga. Bertolak dari pemikiran yang demikian dan sesuai dengan judul penelitian ini, maka untuk melihat bagaimana partisipasi ulama dalam pembangunan sosial budaya di kelurahan Mranggen, dalam paparan pada Bab III ini akan diuraikan satu-persatu partisipasi ulama dalam pembangunan sosial budaya yang mencakup sebelas kegiatan sebagaimana disebutkan di atas.

### **3.1. Partisipasi Ulama Dalam Kesejahteraan Masyarakat**

Partisipasi ulama di kelurahan Mranggen, tempat penelitian ini dilakukan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui sektor ekonomi antara lain, dilaksanakan melalui kegiatan penyalangan dana yang dihimpun secara suka rela yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai tambahan modal usaha. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu atas inisiatif para ulama di kelurahan Mranggen juga pernah dirintis berdirinya koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Modal dasarnya berasal dari para ulama dan tokoh masyarakat yang mampu dan mempunyai kelebihan. Peminjam diprioritaskan untuk anggota masyarakat yang dipandang kurang atau bahkan tidak mampu. Namun demikian dalam prakteknya koperasi tersebut tidak bisa bertahan atau berjalan lama. Hal itu disebabkan para peminjam (yang rata-rata dari golongan ekonomi lemah) tidak bisa mengembalikan pinjamannya walaupun dengan cara mengangsur dan tidak dibatasi waktunya serta tanpa bunga.

Pada umumnya, penyebab ketidakmampuan para peminjam untuk mengembalikan pinjamannya tersebut ada kecenderungan karena para peminjam malas mengangsur, atau bahkan menyepelekan. Di sini sebenarnya kedisiplinan dan kemauan dari peminjam untuk mengembalikan (mengangsur) sangat kurang. Selain itu, hal ini bisa terjadi juga disebabkan oleh lemahnya sanksi terhadap kelalaian atau keterlambatan mengangsur/mengembalikan pinjaman. Bahkan proses dan cara mendapatkan pinjaman pun juga tidak terlalu berbelit-belit serta tanpa agunan selain kepercayaan atas dasar panggilan nurani yang ingin membantu sesamanya meningkatkan taraf hidup / kesejahteraan hidup sesamanya saja. Akibatnya koperasi yang dirintis itu lambat-laun macet dan bubar sama sekali bahkan modal awalnyaapun tidak pernah kembali.

Tentang kegiatan koperasi sampai akhirnya macet tersebut dengan nada agak kecewa dinyatakan oleh beberapa pengurus yang berhasil diwawancarai. Suwandi dan Muslih, dua orang dari sekian banyak pengurus yang berhasil diwawancarai menyatakan : "Kita sebenarnya sudah berusaha maksimal untuk mencoba membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu melalui tambahan modal pinjaman dari koperasi dengan tanpa bunga. Bahkan proses peminjamannya pun sederhana sekali, maksudnya tanpa borg (agunan) hanya lillahi taala ingin menolong meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan sesama. Akan tetapi orang-orang itu seakan merasa tidak berkewajiban untuk mengembalikan, seakan-akan bantuan cumacuma, begitu. Sehingga perputarannya tidak pernah terjadi, dan akhirnya ya itu, koperasi macet. Modal tidak kembali dan kami . . . mau apa ?" (Wawancara dengan Suwandi dan Muslih Nur, 20 September 1995).

Sementara itu upaya peningkatan kesejahteraan melalui bidang pekerjaan bagi masyarakat, secara riil peran serta atau partisipasi para ulama di kelurahan Mranggen kurang begitu tampak. Hal itu di samping para ulama tidak mempunyai dan dapat menyediakan lapangan kerja, juga dalam beberapa hal sulit atau kurang dapat bisa memberikan wawasan, motivasi atau dorongan sehubungan dengan masalah pekerjaan. Dalam kondisi yang demikian masih ditambah dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang heterogen dan relatif masih rendah. Dalam keadaan yang demi-

kian masyarakat setempat, khususnya tenaga pekerja muda cenderung urban baik ke kota-kota terdekat seperti Semarang maupun ke Ibukota (Jakarta) untuk mencari pekerjaan sebagai buruh kasar sekenanya. Berdasarkan hasil pengamatannya Abdul karim, seorang guru Madrasah Aliyah di Mranggen mengatakan bahwa : "Untuk mencoba mencari kesejahteraan bidang ekonomi atau paling tidak memperbaiki ekonominya masyarakat di sini tidak ada yang bertransmigrasi. Mereka cenderung urban ke kota besar seperti Jakarta untuk bekerja entah apa saja, yang penting berhasil dan halal" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995).

Sementara itu kalau tokh ada kelompok-kelompok (kecil) usaha bersama, misalnya kelompok perajin sangkar burung, pembentukan kelompok tersebut tidak atas dasar dorongan atau saran para ulama. Hal itu disamping karena kesadaran sendiri untuk membentuk kelompok agar tidak terjadi persaingan tidak sehat juga atas dukungan dan dorongan para tokoh masyarakat non ulama. Tentang hal ini dengan bahasa yang lugas Machin menyatakan : "Saya tahu persis kegiatan para Kyai, mereka siang malam tenggelam dalam dunianya mendalami masalah-masalah kagamaan .. Sering kali mereka nampak kurang memikirkan kiri-kanannya, yang jelas setiap hari dan bahkan sepanjang hari ada saja para santrinya yang datang kepadanya untuk menimba ilmu keagamaan. Dengan demikian kapan para Kyai bisa berkiprah dalam hal peningkatan usaha kerja? Saya pingin tahu Kyai mana yang ikut memikirkan hal itu?" (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

Lebih jauh perihal upaya peningkatan kesejahteraan umum, ide atau dasar pemikirannya lebih banyak banyak dimotivasi oleh para tokoh masyarakat non ulama. Hal itu banyak tercetus dalam pertemuan masyarakat (arisan intern RT) yang diselenggarakan setiap 35 hari (selapan) sekali. Dalam pertemuan-pertemuan itu sering dibahas hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan bersama. Sementara itu hampir bisa dipastikan para ulama tidak pernah bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Dengan demikian ide dasar tidak bisa ditimba dari para ulama. Dalam hal ini peran ulama tampak atau dilibatkan pada saat menjelang pelaksanaan suatu kegiatan. Pada saat kegiatan akan dilakukan, para ulama diberi tahu dan dimohon dengan hormat untuk ikut men-



sukseskan kegiatan dengan memberikan arahan/ajakan kepada segenaparganya. Sebab dengan didukung oleh keikutsertaan para ulama tersebut, tingkat keberhasilan suatu pekerjaan bersama untuk kepentingan umum dapat lebih terarah dan tercapai. Lebih jauh dengan kondisi yang demikian disadari bahwa biasanya para ulama juga memberikan contoh positif dengan memberikan sumbangan yang lebih banyak ketimbang yang diberikan oleh orang-orang pada umumnya. "Jelas para ulama (Kyai) kita mohon bantuannya untuk menyampaikannya dalam pertemuannya dengan santri-santrinya, sehingga para santrinya (juga masyarakat luas) pun mau berpartisipasi menyumbang karena diberi contoh Kyainya yang memberikan sumbangan lebih besar dari rata-rata sumbangan masyarakat umum". Demikian dikatakan oleh Sadad, salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya dikatakan oleh Sadad bahwa dalam hal sumbang menyumbang ini, "anehnya sumbangan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sifatnya umum relatif lebih kecil kalau dibandingkan dengan sumbangan untuk keperluan keagamaan, dan kenyataan itu sudah sulit untuk dirobah. Jalan di kampung ini pengerasannya terwujud karena juga bantuan para ulama (Kyai) itu tadi" (Wawancara dengan Sadad, 20 September 1995).

Lebih jauh dengan keterlibatan atau partisipasi para Kyai dalam pembangunan fisik seperti misalnya dalam pembangunan sebuah jembatan yang dikerjakan secara swadana dan swadaya, walaupun para ulama tidak terlibat secara fisik, tetapi mereka menyumbang material seperti semen, pasir, besi beton, dan kebutuhan material lainnya. Mengenai hal ini Suwandi, salah seorang ketua RW di kelurahan Mranggen menuturkan sebagai berikut : "Memang dalam setiap pertemuan intern RT yang diadakan setiap 35 hari sekali, bisa dipastikan bahwa para Kyai tidak pernah hadir. Tapi peran sertanya dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa pasti terlibat. Misalnya pada saat kita mau membuat jembatan dimulut jalan ini, di mana rapat RT memutuskan pembangunannya, tapi dananya tidak ada. Lantas saya selaku ketua RW mencoba mendekati orang-orang yang dipandang berada. Mereka menyumbang apa saja; ya uang, tenaga, maupun material. Lha untuk para ulama seperti Kyai Maghfur, Kyai Kholiq dan itu

Kyai Ridwan, ... mereka membantu dengan antusias sekali dalam ujud material, bahkan ketika kehabisan semen pun kita minta tambahan ke sana " (Wawancara dengan Suwandi, 20 September 1995).

Kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di kelurahan Mranggen yang juga mendapat perhatian masyarakat diantaranya adalah masalah : kebersihan bersama, pengaturan selokan/got, pengerasan jalan, pembuatan jembatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan di depan, sering kali bukan merupakan produk atau hasil pemikiran para ulama melainkan timbul dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang dimotori oleh para tohohnya (non ulama) untuk meningkatkan kesejahteraan hidup/lingkungannya. Dalam praktik para ulama juga ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam beberapa hal di antara ulama itu kurang begitu menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan umum. Hal ini terlihat misalnya berkaitan dengan kebersihan umum. Seorang informan mengatakan bahwa masalah kebersihan bersama pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, beberapa ulama kadang-kadang bersikap apatis. Pandangan ini terungkap dari informasi informan sebagai berikut : "Masalah saluran di sekitar pondok, walaupun mambek, berbau sangat tidak sedap, berkesan jorok dan kotor serta mengganggu, kyai dan santrinya tidak ada yang berinisiatif untuk membersihkannya. Ironisnya mereka tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Baru setelah masyarakat yang dipimpin oleh para tokohnya mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan, para ulama (kyai) menyuruh santrinya untuk ikut berpartisipasi ikut bekerja bakti membersihkan lingkungannya termasuk mengatasi kemacetan selokan di sekitar pondok. Walaupun sudah diberikan contoh demikian, kalau suatu saat selokan mampet lagi, mereka tidak berinisiatif sendiri untuk membersihkannya meskipun terbatas hanya di lingkungannya sendiri" (Wawancara dengan Suwandi, 20 September 1995).

Apa yang dituturkan oleh Suwandi di atas tentu saja tidak berlaku untuk semua ulama di Mranggen. Sebab ada juga ulama yang secara langsung berkecukupan dalam kiprah kemasyarakatan dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka kebersihan lingkungan. Meskipun diakui juga oleh K.H. Abdul Karim, salah seorang ulama di kelurahan Mranggen, bahwa kegiatan kebersihan lingkungan harus dilakukan terus menerus tetapi kadang-kadang karena kesibukan hal itu terlupakan. Dalam kaitan ini dia menuturkan sebagai berikut : "Untuk pengaturan saluran, got, selokan misalnya, saya dalam rapat RT sudah menganjurkan kepada masyarakat. Itu kan bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Ya itu langsung dikerjakan, yang mampet dibongkar, bahkan dibuatkan tembusan-tembusan pembuangan atau jalan air, tapi sekarang menjadi kurang lancar lagi karena adanya bangunan-bangunan baru dan itu belum sempat dibicarakan lagi dalam rapat RT karena saya agak sibuk" (Wawancara dengan K.H. Abdul Karim, 20 September 1995).

Masih dalam kaitannya dengan partisipasi ulama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seorang ulama yaitu Djafar Sodiq menyatakan : "Kami adalah seorang warga NU, sesuai dengan kesepakatan keluarga besar NU yaitu kembali ke kithoh 26, maka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai maka wawasan atau pikiran kesejahteraan khususnya pribadi sesuai dengan yang diridloi Allah" (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Djafar Shodiq, Hajah Azizah berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat itu berkaitan dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini peran ulama jelas, seperti dikatakannya bahwa : "Untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi (materi), kami mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah agar bisa membuka atau memperbesar usaha. Ya dengan pinjaman yang dikembalikan secara angsuran. Kami juga mendirikan koperasi, dengan berkoperasi kita bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita" (Wawancara dengan Hj, 03 Oktober 1995).

### 3.2. Partisipasi Ulama dalam Pendidikan

Partisipasi Ulama di Kelurahan Mranggen dalam pembangunan sosial budaya bidang pendidikan tampak pada keterlibatan langsung para Ulama dalam kiprah dunia pendidikan. Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kehidupannya yang kental dengan masalah-masalah keagamaan (Islam), maka dunia pendidikan yang digelutinya pun adalah pendidikan agama (Islam). bahkan karena kuatnya latar belakang keagamaannya, masalah materi sebagai imbalan jerih payahnya berkiprah dalam dunia pendidikan sama sekali tidak pernah difikirkan. " ... kami hanya mencari ridlo Allah, semua lillahi ta'ala". (Wawancara dengan Muslih Nur dan Dja'far Shodiq 20 September 1996).

Kenyataan tersebut sangat dimungkinkan sebab disamping para Ulama (Kyai) kondisi sosial ekonominya rata-rata sudah baik dan mantap (kebanyakan mereka berdagang dan rata-rata memiliki kios atau toko), hal-hal yang bersifat agamis lebih dominan mewarnai kehidupannya. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka semangat yang muncul lebih berorientasikan pada pemenuhan sebagian kewajibannya sebagai umat beragama (Islam) yang ikut bertanggung jawab membawa umatnya menuju ke kesejahteraan hidup dunia dan akhirat melalui ridlo Allah daripada mengejar keuntungan material.

Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa partisipasi golongan ulama dalam bidang pendidikan, lebih tercurah pada pendidikan agama. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya anggapan para ulama bahwa pembinaan dalam bidang pendidikan keagamaan merupakan tanggung-jawabnya. bahkan mereka memiliki perasaan terpanggil untuk memberikan dan menyebarluaskan ilmu agama yang dimilikinya. Tingginya tingkat partisipasi ulama dalam pembinaan pendidikan agama juga didasari oleh kesadaran para ulama terhadap fungsi sosial ulama yaitu mengkhususkan diri sebagai pendakwah agama. Dalam diri para ulama terdapat perasaan berdosa apabila tidak mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya. Berdasarkan hal-hal itulah secara umum paraulama berpartisipasi dalam pembinaan pendidikan keagamaan yang ditujukan pada semua kalangan maupun umur. Ulama melakukan pembinaan bukan

saja pada kelompok masyarakat yang tua, namun juga pada kelompok anak-anak, wanita maupun kaum muda.

Di antara para ulama dalam upaya pengembangan dan pembinaan keagamaan ada yang telah memiliki institusi khusus seperti lembaga pendidikan, pondok pesantren. Lembaga itu digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terutama terhadap generasi muda dalam bidang pendidikan. Pada umumnya santrinya berasal dari berbagai daerah, tidak terbatas pada mereka yang berasal dari kelurahan Mranggen dan sekitarnya. Materi pendidikan diajarkan/diberikan dalam pondok pesantren secara formal melalui kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ulama-ulama semacam ini pada umumnya ialah ulama dari lulusan pondok pesantren tradisional dari berbagai pondok yang telah dikunjunginya. Mereka pada umumnya adalah golongan ulama generasi tua dan mengenyam pendidikan formal di Sekolah Rakyat yang setingkat dengan Sekolah Dasar.

Motivasi para ulama untuk mendirikan pondok pesantren didasarkan pada amanat yang disampaikan oleh para pendahulunya (gurunya), yakni bahwa santri yang telah lulus dari pondok pesantren maka di kampungnya mereka mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ilmunya dengan mendirikan pondok pesantren. Di samping itu ada pula dasar pemikiran lain yang mendorong di antara para ulama untuk mendirikan pondok pesantren. Hal ini tampak dari informasi yang dikatakan oleh Muslih Nur bahwa "Kiprah kami dalam dunia pendidikan termotivasikan sebagai perwujudan sebagian kewajiban dan tanggung jawab kami mempertahankan agar Islam tetap bertahan dan berkembang. Di samping itu realita menunjukkan banyak anak-anak usia sekolah yang karena kondisi sosial ekonomi keluarganya kurang mampu tidak dapat bersekolah. Sementara itu melalui pembekalan dan pendidikan bidang keagamaan akan dapat menekan gejolak negatif yang gampang sekali muncul dalam kehidupan dunia anak remaja, leh karenanya kami terpenggil untuk menyelenggarakan pendidikan" (Wawancara dengan Muslih Nur, 20 September 1995).

"Dorongan atau motivasi yang membuat kami banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan semata-mata atas dorongan agama

ialah : kewajiban manusia sebagai kalifah di muka bumi ditekankan apabila memiliki ilmu walau sedikit harus disampaikan agar tidak terputus dengan mata rantai agama sehingga ada generasi penerus. Hal itu merupakan amal jariyah" (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

Sebagai realisasi dari peranserta para Ulama dalam dunia pendidikan itu, maka di kelurahan Mranggen banyak didirikan TPA (Tempat Pendidikan Al Qur'an) bagi anak dan remaja, Pondok-pondok Pesantren, MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Dalam TPA (yang diperuntukkan bagi anak dan remaja) khusus diajarkan pendalaman pembacaan huruf Arab (Al Qur'an) dan tafsirnya. Sedangkan dalam MI (yang setingkat dengan Sekolah Dasar) materi pelajarannya hampir sama dengan kurikulum jenjang pendidikan sekolah dasar, tetapi materi keagamaannya lebih mendapatkan prioritas penekanannya dengan porsi jam pelajaran yang lebih banyak dibanding dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Demikian halnya dengan MTs yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama dan MA yang setara dengan Sekolah Menengah Umum.

Karena MI, MTs maupun Aliyah adalah media-media pendidikan yang bersifat formal dan berorientasi pada pendidikan-pendidikan sekolah umum, maka pendirian dan penyelenggaraannya dibentuk melalui yayasan sosial yang bergerak pada bidang pendidikan yang beranggotakan para Ulama (Kyai). Melalui institusi pendidikan yang berhasil didirikan oleh para Ulama tersebut, proses kegiatan belajar mengajarnya walaupun tidak menempati gedung atau ruangan sekolah, dapat dilaksanakan secara syah/resmi dan berdasarkan kurikulum yang baku. Sedangkan TPA-TPA lebih banyak menempati rumah-rumah penduduk yang masih mempunyai ruangan yang bisa dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan pendalaman dan pemahaman Al Qur'an.



Gambar 39 Suasana siswa MA yang sedang Istirahat

Walaupun sistem manajerialnya diupayakan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, tetapi hal-hal yang menyangkut penarikan dana (SPP, BP3, dan sebagainya) dilaksanakan relatif lebih lunak yang kesemuanya diupayakan untuk tidak memberatkan orang tua siswa. Bagi yang benar-benar tidak mampu, mereka dibebaskan sama sekali dari kewajiban membayar biaya pendidikan. Sedangkan untuk biaya kehidupan Yayasan, tepatnya sekolah, kekurangannya disuplai dari para Ulama, khususnya para pendirinya. Misalnya untuk menggaji guru, karyawan, kelengkapan belajar mengajar. "kalau kami memikirkan untung ruginya secara material, mendirikan MI dan MTs tersebut jelas yang ada hanyalah kerugian. Tetapi karena hal itu bukan merupakan tujuan yang ingin kami capai, maka semua kekurangan kami penuhi bersama antara para pendiri yayasan. Orientasi kami adalah 'ridlo Allah', bukan keuntungan materi dan alhamdulillah, semuanya selama ini bisa berjalan lancar" (Wawancara dengan Muslih Nur dan Dja'far Shodiq, 20 September 1995).

Sementara itu penyelenggaraan TPA-TPA karena bersifat semacam kursus, (bukan pendidikan formal), maka baik pendirian maupun pelaksanaan kegiatannya sederhana sekali. Tempat cukup di rumah-rumah penduduk dan masalah waktunya pun sangat longgar dalam arti mencari kekosongan waktu baik bagi peserta didik maupun pengajarnya. Sedangkan para pengajar atau pembimbingnya adalah para santri dan/atau remaja yang lebih dewasa yang sudah menguasai materi dengan mendapat bimbingan dan arahan para Ulama yang lebih senior. Untuk para remaja dan orang-orang dewasa, masalah pendidikan dan pendalaman ajaran keagamaan (Islam) di samping ada pada pondok-pondok pesantren yang memang jumlahnya cukup banyak, juga berpusat di masjid-masjid dengan mengambil



Gambar 3.10 Sebuah Ceramah dan dialog Keagamaan

waktu malam hari. Sementara bentuk kegiatannya berupa ceramah dan dialog disertai dengan pembahasan dan pendalaman keagamaan. "Kami memang sengaja mengarahkan para remaja untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dengan demikian



suasana masjid sebagai rumah Allah tampak hidup" (Wawancara dengan Muslih Nur, 20 September 1995).

Dasar pemikiran lain di antara para ulama yang lebih menekankan partisipasinya pada bidang pendidikan ketimbang pada bidang lain, dikatakan Hajah Azizah bahwa : "Anak adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, oleh karenanya harus dididik agar tidak hanya kaya otak (pandai) saja, tetapi juga kaya hati (kuat iman dan taqwa). Sebenarnya anak ibarat kertas putih yang bisa ditulisi apapun tergantung keinginan sang penulis. Apabila dasar agamanyakuat, maka hidup akan selamat, tahu mana yang salah dan mana yang benar. Apabila kelak menjadi pejabat maka jadilah pejabat yang jujur. Jadi dasar utama pendidikan adalah agama (Islam), bila sebuah negara yang memimpin adalah orang yang kuat beragama, maka negara dapat mencapai : *baladun toyibatun wa robbun gafur*, pada dasarnya ingin membantu pemerintah memajukan dan menyejahterakan rakyat melalui program pendidikan" (Wawancara dengan Hj. 'Azizah, 26 September 1995).

Secara umum perkembangan dunia pendidikan di kelurahan Mranggen sekarang ini sudah maju. Kenyataan ini diakui oleh Machin seorang warga kelurahan Mranggen yang menyatakan bahwa : "Mengenai pendidikan di sini bisa dikatakan sudah maju. Buta huruf sudah lama tidak ada. Itulah sebabnya program Kerja Paket A dan B sekarang ini sudah tidak jalan lagi. Apalagi dengan adanya program pemerintah tentang *Wajar 9* tahun, wah mereka (para ulama/kyai) makantar-kantar tentang wajar, tapi ya itu karena mereka orang Islam ya harus disekolahkan di sekolah-sekolah yang berbau Islam. Setelah dianjurkan oleh para kyai mereka berbondong-bondong tapi ke sekolah yang berbau Agama. Sedangkan sekolah non agama mereka menamainya sebagai Sekolah Jawa" (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

Dari uraian di muka tampak bahwa para ulama di kelurahan Mranggen cukup aktif berperanserta dalam rangka ikut memajukan dunia pendidikan masyarakat Mranggen. Peranserta yang mereka jalankan ternyata bervariasi melalui berbagai cara, baik melalui ceramah, dialog, khotbah, pengajian, terjun dalam yayasan-yayasan sosial yang mengelola pendidikan, maupun aktif sebagai donatur tetap dalam penyelenggaraan suatu bentuk pendidikan.

Terlihat bahwa para ulama di kelurahan Mranggen telah benar-benar berperan secara aktif dalam kegiatan pendidikan. Kenyataan ini dibenarkan oleh Abdul Karim, seorang guru di MTs dan MA yang mengatakan : "Bicara masalah pendidikan kami ini sebagai seorang pendidikan sekaligus kepala sekolah yang kebetulan dipandang sebagai seorang ulama, jadi sudah jelas kami berperan sangat aktif. Apalagi pendidikan keagamaan dasar kami ya Qur'an dan Sunnah Rosul" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995).

### **3.3. Partisipasi Ulama dalam Bidang Kebudayaan**

Partisipasi para ulama di kelurahan Mranggen dalam pembangunan dan pengembangan kebudayaan khususnya kesenian tidaklah banyak, hanya terbatas pada kesenian yang bernafaskan Islam. Kenyataan seperti ini wajar, dan sifat keterlibatannya juga terbatas. keterlibatannya para ulama dalam pembinaan kesenian pada umumnya sebatas pada memberikan pengarahan dan meluruskan kegiatan dari hal-hal yang bersifat akan menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Oleh karena itu jenis-jenis kesenian yang menurut pertimbangan para ulama itu tidak sesuai dengan nafas agama tidak mereka setujui. Hal-hal yang bersifat pembinaan dalam arti pembentukan kelompok atau group kesenian, penyelenggaraan waktu latihan yang rutin, penguasaan suatu instrumen atau alat kesenian tertentu maupun hal-hal lain yang bersifat teknis tidak pernah dilakukan. Dengan kata lain partisipasi ulama dalam pembangunan sosial budaya bidang kebudayaan khususnya tersebut hanya pada bentuk dan materi seni (pertunjukan) saja.

"Secara langsung kami memang tidak membina kesenian, tetapi seni-seni khas Islam yang telah ada tetap kami pertahankan. Misalnya qosidah, terbang, berjanji dan sebagainya. Untuk orkes melayu, kami melarang sebab seringkali bisa menimbulkan remaja mabuk-mabukan." (Wawancara dengan Muslih Nur, 20 September 1995)

Sementara itu mengenai bentuk atau jenis kesenian yang bernafaskan Islam, Hajjah Azizah mengatakan : "Untuk kesenian, sebagai orang muslimat maka kesenian yang paling cocok adalah

kesenian yang membawa misi siar Islam. Hal itu adalah rebana. Untuk itu kadang-kadang kita masih sering latihan. Tidak ada pelatih khusus paling ya kita hanya menunggu kalau sempat." (Wawancara dengan Azizah, 03 Oktober 1995).

Penyataan senada juga dilontarkan oleh informan lain, yaitu Machin yang mengatakan bahwa "Masalah kesenian, kami hanya menonjolkan yang bersifat atau bernafaskan Islam. Di antaranya yang dikembangkan dalam arti masih sering latihan adalah seni terbang atau rebana. Sedangkan seni lainnya seperti orkesan (ndangdut), itu anak saya hampir setiap malam terpakai tapi ya itu di luar daerah sini. Kalau yang ada di sini ya itu hanya terbang. Sedangkan kesenian dari luar, kalau mau nanggap wayang kulit ya itu dalangnya Joko Edan dengan sinden Waljinah akan banyak penontonnya, kalau bukan mereka sedikit sekali yang menonton. Tetapi beberapa kali pengalaman, hal itu sering menimbulkan kerawanan keamanan, maka sekarang di sini dilarang". (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

Pengembangan khusus terhadap kesenian di kelurahan Mranggen, khususnya oleh para ulama memang boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh salah seorang ulama yaitu Djafar Sodik yang menyatakan bahwa : "Dalam hal kebudayaan, khususnya kesenian, kami tidak pernah mengembangkan secara khusus. Paling meluruskan dan mengarahkan agar tidak berbelok dari ajaran agama. Sementara ini kesenian yang paling cocok ya terbang, berjanji dan sebagainya." (Wawancara dengan Djafar Shodik, 20 September 1995).

Sebenarnya dalam perkembangan kesenian, dahulu cabang-cabang kesenian lain juga pernah ada dan berkembang. Kesenian Tayub misalnya, dulu di Mranggen itu banyak sekali, tetapi sekarang ini sudah tinggal kenangan. Banyak alasan kenapa kesenian ini akhirnya tidak berkembang, meskipun dari segi hiburan sebenarnya cukup didukung oleh warga masyarakat umum. Kenyataan ini diakui Abdul Karim yang mengatakan bahwa : "Dulu di sini ini gudangnya tayub, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang di daerah pinggir sana dan dengan dengan sembunyi-sembunyi, artinya jauh dari ulama. Dalam hal ini kyai kadang-

kadang juga ikut terlibat secara langsung dalam hal pembinaan kesenian khususnya yang mendukung siar Islam. Untuk para remajanya umumnya sulit, sebab mereka lebih mengutamakan hiburannya. Tapi yang jelas kami melarang orkes-orkes karena hanya akan membuat remaja jadi mabuk, kalau sudah begini orang tua yang harus diarahkan, kalau tidak mampu ya diserahkan polisi." (Wawancara dengan Abdul karim, 20 September 1995).

Apa yang dikatakan oleh Abdul Karim tersebut dibenarkan pula oleh Sadad : "Masalah kesenian, di sini tidak ada. Kalau ada ya itu yang bernafaskan Islam. Dulu ada tayub, tapi sekarang sudah minggir ke daerah Kangkung sana. Pembinaannya tidak ada ya remaja itu sendiri, itu saja sebatas kalau mau dipakai/dipertunjukkan untuk pentas seni." (Wawancara dengan Sadad, 20 September 1995).

Kesenian rebana atau terbangpun yang banyak didukung oleh para ulama di kelurahan Mranggen, ternyata perkembangannya tidaklah begitu menggembirakan. Meskipun usaha-usaha pernah dilakukan. Suwandi salah seorang warga yang pernah mengembangkan kesenian ini menuturkan : "Dalam bidang kebudayaan kesenian, kami dulu pernah membina kesenian rebana/terbang banten. Bahkan untuk alatnya pada waktu itu kami membuat sendiri, tapi perkembangannya sekarang sudah tidak aktif lagi (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

### **3.4. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Kesehatan**

Partisipasi Ulama dalam pembangunan sosial budaya bidang kesehatan di kelurahan Mranggen tampak cukup menonjol. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan masalah kesehatan sering disinggung oleh para ulama dalam pembicaraannya dengan masyarakat baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar himbauan dari pemerintah. Rata-rata penduduk di Mranggen telah sadar akan arti kesehatan bagi kehidupan ini, oleh karena itu seringkali masalah ini tidak disinggung. Atau kalaupun hal itu dibicarakan biasanya sifatnya hanya sekedar untuk mengingatkan.

Adapun materi ceramah dan cara mengingatkan/menyadarkan akan pentingnya kesehatan dilakukan seperti yang diinformasikan oleh informan kami sebagai berikut : "Walaupun kita sering mendapat titipan dari pemerintah melalui Lurah maupun Camat untuk menyebarluaskan berita kesehatan misalnya tentang penanggulangan demam berdarah dan sebagainya, kita juga sering dengan kesadaran sendiri berinisiatif memasyarakatkan masalah kesehatan. Misalnya tentang berita PIN (Pekan Imunisasi Nasional) yang baru saja, atau masalah Keluarga Berencana. Juga tentang gerakan kebersihan lingkungan. Itu sering kami lontarkan dalam ceramah-ceramah dengan masyarakat. bersih itu kan sehat, sementara bersih adalah sebagian daripada iman, yaitu yang kita singgung dan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita hubungkan dengan masalah-masalah keagamaan, hasilnya sudah tentu akan lebih" (Wawancara dengan Hj. Azizah, 03 September 1995).

Hal yang kiranya dalam kehidupan sehari-hari sering terlewatkan adalah masalah kesehatan lingkungan. Meskipun kesadaran itu ada, tapi karena alasan kesibukan dan lain-lain masalah kesehatan lingkungan terlewatkan. Padahal masalah kebersihan itu haruslah rutin, dilakukan dan dikerjakan secara terus menerus. Kenyataan pada suatu saat di lingkungan warga masyarakat Mranggen kadang-kadang nampak bersih, tetapi saat lain kotor, begitu seterusnya. Kegiatan kebersihan lingkungan biasanya marak pada saat-saat tertentu saja, misalnya menjelang peringatan hari besar nasional, atau akan diadakan lomba kebersihan.

"Untuk kesehatan bersama atau kesehatan lingkungan, kami menganjurkan kepada masyarakat untuk menata dan mengatur selokan/parit, mencoba menanggulangi banjir atau air yang mambek dengan membuat saluran baru. Sedangkan masalah wabah suatu penyakit, kami sering menganjurkan penanggulangannya melalui kotbah-kotbah saya. Semua itu bukan pasti merupakan titipan pemerintah, yang sangat sering ya atas inisiatif kami sendiri yang ikut berupaya menciptakan lingkungan sehat. Apalagi menjelang lomba desa, sudah pasti semuanya ditata, biar menang" (Wawancara dengan Abdul Karim, 20 September 1995).

"Untuk masalah kesehatan, di daerah sini sudah maju. Kalau sakit ya dibawa ke Puskesmas atau dokter dan jarang didukunkan, kalau anak panas ya kadang dibawa ke "orang tua". Tapi kalau yang sifatnya umum, ya menunggu komando dari desa, karena orang-orang lebih mementingkan kesehatan pribadi masing-masing. Untuk hal-hal yang bersifat kebersamaan, kesehatan lingkungan ya berupa perbaikan got, saluran, pengaspalan jalan di sini sudah berjalan baik. Apalagi program itu didukung oleh para ulama hasilnya pasti sangat memuaskan" (Wawancara dengan Sadad, 20 September 1995).

"Masalah-masalah kesehatan lainnya, dengan melihat situasi kesehatan masyarakat, atas inisiatif sendiri dalam kotbah-kotbah ya saya sering menyinggung, tapi sama sekali tidak pernah dititipi program pemerintah. Rata-rata orang sini sudah sadar masalah kesehatan, jadi saya pikir tidak ada masalah, itu kesadaran pribadi. Selain itu hal-hal yang bersifat untuk bersama ya kita usahakan secara bersama, misalnya dengan kerja bakti massal membersihkan lingkungan dan sebagainya" (Wawancara dengan Muslih Nur, 20 September 1995).

Peranan para ulama seringkali hanya terbatas dalam memberi ceramah saja, tetapi terjun langsung secara riil dalam kegiatan kebersihan lingkungan jarang dilakukan. Tentang hal ini Machin salah seorang warga kelurahan Mranggen mengatakan sebagai berikut. "Masalah kesehatan lingkungan, kalau para kyai mau memberi komando bahwa kurang bersih (kotor) itu haram, maka serentak gerakan kebersihan lingkungan akan berhasil, nah bersih itu kan sehat. Itu biasanya berawal dari lingkungan tempat ibadah, kalau itu sudah resik, mesjid juga bersih itu sudah cukup, itu gerakan para kyai hanya peduli kebersihan/kesehatan lingkungan sendiri, di luar lingkungan mereka, mereka sering kurang peduli." (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

Dengan bahasa yang lebih halus dalam menyoroti masalah peranan para ulama dalam hal kebersihan lingkungan tersebut, Suwandi mengatakan : "Soal kesehatan lingkungan, kami bersama para kyai mencoba mengatur dan melancarkan kemacetan selokan dengan membuatkan gorong-gorong atau jembatan, itu lho yang ada

di jalan masuk kampung ini, di pinggir jalan itu. Untuk orang yang sudah terlanjur sakit kalau ia tidak mampu ya kita bantu secara bergotong royong. Semua itu idenya kebanyakan datang dari masyarakat secara spontan, para ulama hanya mendukung saja sifatnya. Itu bisa dimaklumi soalnya kyai-kyai waktunya tidak ada. Yakni pagi, siang dan sore bahkan malam waktunya hanya untuk mengisi pengajian-pengajian (mengajar)." (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

Lebih netral lagi Djafar Shodiq mengatakan bahwa : "Hal-hal yang menyangkut kebersamaan, misalnya tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena kebetulan kami adalah seorang anggota LKMD dan LMD, maka semua ya kita pikirkan bersama dan merupakan program kerja kami. Dan, itu berjalan atas kesadaran dan partisipasi masyarakat sendiri. Sehingga masalah kesehatan lingkungan ya dapat berjalan dengan baik". (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

### **3.5. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera**

Partisipasi Ulama dalam pembangunan sosial budaya bidang Kelurga Sejahtera tampak cukup menonjol. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, masalah kesejahteraan keluarga sering disinggung oleh para ulama dalam pembicaraannya dengan masyarakat baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar himbauan dari pemerintah. Rata-rata penduduk di Mranggen telah sadar akan arti keluarga sejahtera bagi kehidupan ini, oleh karenanya masalah tersebut tidak banyak disinggung dalam arti dibicarakan dalam rangka terapi. Kalau tokh dibicarakan lebih banyak mengenai kesehatan ibu dan anak, dalam hal ini adalah KB.

Berkaitan dengan masalah Keluarga Berencana ini, Hajah Azizah dengan panjang lebar menuturkan pengalamannya. "Keluarga sejahtera kan banyak sekali resepnya". Salah satunya sesuai dengan program pemerintah adalah melalui Keluarga Berencana (KB). Nah untuk masalah KB saya ini contoh nyata dan langsung yang mengalami. Saya dulu pernah *tiga G*, yaitu *gembol*, *gendong* dan *gandheng*. Maksudnya ialah sya sudah hamil besar (*gembol*), sementara kakak bayi dalam kandungan masih belum bisa berjalan

artinya masih sekitar satu tahun jadi masih harus digendong, sedang kakaknya lagi baru berusia sekitar tiga tahun masih harus digendong kalau mau pergi ke mana-mana. Wah repotnya bukan main, oleh karenanya dengan kesadaran sendiri saya menganjurkan kepada para ibu agar ber-KB biar ibu dan anak sehat sejahtera. Sudahlah pokoknya itu betul-betul pengalaman pribadi sampai-sampai Pak Haryono Suyono salut dengan alasan saya waktu itu, saya disalami. Dan, saya ber-KB itu juga dengan satu dasar yang tidak melenceng dari ajaran agama : *fasholihatu qoonitaatu chaafi - dhotu chafidhollah* yang kurang lebih artinya adalah wanita yang sholehah dalam arti taat beribadat kepada Allah adalah yang bisa menjaga/merawat diri sendiri, melayani suami dan keluarga, kepadanya Allah akan melimpahkan rahmat-Nya. Nah, saya kan mau membahagiakan suami dengan merawat diri, maka saya ikut KB. Sebenarnya suami kurang setuju, katanya dengan demikian saja sudah bahagia, tapi kan saya merasa kurang membahagiakannya ? Akhirnya suami setuju dan saya ikut KB dan itu saya sebarluaskan kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu. Hasilnya ya cukup baik saya kira, apalagi saya kan sudah ditatar di Jakarta dan saya sinkronkan dengan ajaran agama jadi ya pas begitulah. Steril, fasektomi, kalau itu hanya berkeinginan agar tidak punya anak itu sama sekali tidak boleh, kalau dengan alasan yang kuat dan dasar yang kuat itu diperbolehkan. Pokoknya upaya untuk mencapai keluarga sejahtera bagaimanapun tetap kami sesuaikan dengan sendi-sendi ajaran agama Islam" (Wawancara dengan Hajah Azizah, 03 September 1995).

Masalah Keluarga Berencana di kelurahan Mranggen memang didukung sepenuhnya oleh para ulama. Bahkan bagi mereka yang tidak mengikuti program KB juga mendukung, dan ikut menyebarkan. Hal ini sebagaimana diinformasikan informan kami di lapangan sebagai berikut. "Untuk saya walaupun tidak ikut KB tapi saya terangkan bahwa KB tidak dilarang oleh agama. Saya menemukan dalilnya, tapi saya sudah agak lupa, tepatnya harus dicari lagi dalam kitab, takut kalau keliru. Dalam hal ini kalau para ibu dapat merencanakan jangka kelahirannya kan bisa sehat, di samping itu KB itu program pemerintah jadi ya harus dilaksanakan." (Wawancara dengan Abdul Karim, 20 September 1995).



"KB di Mranggen berjalan lancar dan kami kira tidak ada masalah. Semua berjalan dengan sendirinya, karena masyarakat telah semakin sadar bahwa untuk mencapai keluarga sejahtera salah satu cara ialah melalui KB. Di samping itu di sini hampir tidak ada anak atau ibu-ibu menganggur. Semua mencari kesibukan yang bisa membantu mewujudkan keluarga sejahtera melalui peningkatan pendapatan. Ya macam-macam usaha mereka. Ada yang berjualan, buruh maupun pekerjaan-pekerjaan halal lainnya. Seperti isteri saya misalnya, ia walaupun kecil-kecilan dan sederhana buka toko dan merias pengantin. Lumayan kalau laku bisa untuk tambahan pendapatan kami (Wawancara dengan Sadad, 23 September 1995)

"Anak kami lima orang. Kami tidak ikut KB, tapi juga tidak menentang dan juga tidak menganjurkan kepada masyarakat untuk ikut KB. Itu kan program pemerintah, biar pemerintah yang melaksanakan. Kalau menyejahterakan keluarga bisa melalui KB, ya silakan. Lain halnya dengan masalah-masalah kesehatan lainnya, dengan melihat situasi kesehatan masyarakat atas inisiatif sendiri dalam kotbah-kotbah ya saya sering menyinggung, tapi sama sekali tidak pernah dititipi program pemerintah. Rata-rata orang sini sudah sadar masalah kesehatan, jadi saya pikir tidak ada masalah, itu kesadaran pribadi." (Wawancara dengan Muslih Nur, 20 September 1995).

"Menegenai kesejahteraan keluarga yang jelas rata-rata masyarakat di sini ya berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Baik melalui upaya mencari tambahan pendapatan maupun hal-hal lain. Termasuk mendengarkan ceramah para kyai tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga yang sakinah mawadha wa rokhmah. KB di sini kurang aktif, kecuali kalau yang bicara para kyai ya banyak yang mengikuti." (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

Berbeda dengan Machin, Suwandi mengatakan bahwa program KB di kelurahan Mranggen berjalan cukup baik. "Soal kesejahteraan keluarga atau keluarga sejahtera, yah rata-rata seluruh keluarga mendukung terciptanya kondisi kehidupan keluarga yang sejahtera. Apakah itu dengan membantu suami atau orang tua mencari tambahan pendapatan ataupun upaya-upaya lain. jangan lupa

KB adalah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah itu di sini berjalan cukup baik" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995)

"Anak kami lima orang. Untuk meningkatkan atau menciptakan keluarga sejahtera, di samping dengan menekuni atau mengamalkan ajaran agama juga kami membuka warung sekedar mendapatkan tambahan penghasilan. Alhamdulillah semuanya tidak ada masalah. Untuk masyarakat juga saya sarankan hal yang demikian menerapkan dan mengamalkan ajaran agama (Islam) untuk bisa mencapai keluarga sejahtera" (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995)

### **3.6. Partisipasi Ulama dalam Bidang Kependudukan**

Masalah kependudukan yang berkaitan dengan perencanaan dan pembatasan kelahiran sebagai upaya menekan laju jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana telah banyak disinggung di depan. Sementara itu kalau dilihat dari komposisi jumlah penduduknya di desa Mranggen, dengan jumlah KK 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) dan jumlah jiwa keseluruhan 8.198 (delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) orang, maka rata-rata tiap KK berjumlah 4 Jiwa. Hal itu mencerminkan angka ideal yang sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, yaitu catur warga. Dengan demikian mengenai aspek kependudukan bisa dikatakan tidak ada masalah, dalam arti sesuai dengan canangan kebijakan pemerintah pada umumnya.

Berkaitan dengan penduduk dan peluang pekerjaan juga sudah disinggung dibagian muka, yang pada hakekatnya bahwa penduduk di kelurahan Mranggen tidak ada masalah. Yang mungkin perlu terus ditingkatkan adalah masalah sumber daya yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan memegang peranan penting.

### **3.7. Partisipasi Ulama dalam Pembinaan Anak dan Remaja**

"Untuk pembinaan anak dan remaja, memang kami pisahkan. Untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah, kami arahkan melalui pendidikan formal. Baik sekolah negeri, swasta mau-

pun madrasah. Dengan demikian pendidikan formalnya mereka dapatkan di sekolah-sekolah resmi atau seperti yang kami sebut di atas, sedang pendidikan keagamaannya ya melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid dan TPA-TPA yang banyak tersebar di sekitar sini. Sementara itu untuk para remajanya kami arahkan agar senantiasa bisa mengikuti kegiatan pendalaman keagamaan agar terhindar dari kasus-kasus kenakalan remaja. Alhamdulillah hal itu cukup efektif, pesertanya juga cukup banyak, bahkan bisa dikatakan semua remaja di sini selalu mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah dan dialog keagamaan yang diselenggarakan di masjid kami. Kecuali itu kami juga memikirkan kegiatan yang sesuai dengan dunia remaja dan anak. Misalnya dengan mengikutsertakan mereka dalam karnaval, lomba gerak jalan, baris-berbaris dan sebagainya" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995).

"Masalah anak dan remaja di sini, yang jelas di sini ada Madrasah Tsanawiyah, sehingga anak-anak yang usia sekolahnya hampir semuanya mengikuti jenjang pendidikan dasar. Untuk remajanya di sini ada semacam kumpulan sinoman, juga karang taruna, remaja di sini banyak mengikutinya, olah raga juga. Masalah kenakalan remaja sepertinya di sini tidak ada, kalau ada ya itu masih dalam batas kewajaran" (Wawancara dengan Sadad, 23 September 1995).

"Remaja dan anak-anak pada waktu senggangnya kami arahkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang kami pusatkan di masjid-masjid. Misalnya pada setiap malam Selasa untuk remaja kami adakan *sholawat nariyah* yang salah satu fungsinya adalah untuk menekan kenakalan remaja. Di samping itu kadang-kadang juga kami ajak mengikuti pengajian dan ceramah keagamaan di luar daerah sekalian untuk berekreasi, biayanya ya secara patungan, dipikul bersama untuk menyewa kendaraan. Sedangkan bagi anak-anaknya setiap sore kami adakan pelajaran mengaji di TPA-TPA" (Wawancara dengan Muslih Nur dan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

"Anak-anak dan remaja di sini selain mengikuti kegiatan pokoknya di sekolah-sekolah sebagai pelajar pada umumnya, pada

waktu luangnya yaitu sore hari pada umumnya digunakan untuk banyak belajar dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Kebanyakan dari mereka atas dasar kesadaran sendiri atau bimbingan orang tuanya. Kegiatan-kegiatan keremajaan lainnya yang bersifat umum bagi remaja, misalnya ya olah raga, kumpulan sinoman, karang taruna dan sebagainya yang berjalan cukup lancar atas arahan para tokoh masyarakat setempat seperti Ketua RT, RW. dan lainnya" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

"Dalam ceramah-ceramah keagamaan, kami sering diminta oleh Panitia untuk membicarakan masalah kenakalan remaja. Semua kami berikan tentu saja dengan contoh-contoh dan upaya menghindari atau mengatasinya yang sesuai dengan tuntunan agama (Islam). Pernah satu kali kami diundang ntuk memberikan ceramah di Kabupaten Batang, juga topiknya tentang kenakalan remaja. Karena di sana masih banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja, misalnya suka mabuk-mabukan, kurang kesadaran terhadap lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah dengan materi ceramah saya mereka bisa saya arahkan untuk tidak nakal dan agar sadar terhadap lingkungannya. Saya katakan bahwa remaja adalah harapan negara, negara ini akan maju kalau remajanya maju, kritis dan peduli terhadap lingkungan, dengan didasari keimanan yang kuat maka negara pun akan maju **gemah ripah loh jinawi bahdatun toyibatun wa robbun ghofur**. Alhamdulillah kami dapat kabar akhirnya pemuda di sana berubah" (Wawancara dengan Hj, Azizah, 03 Oktober 1995).

"Untuk anak dan remaja di kelurahan Mranggen sini, banyak kegiatan yang mereka ikuti, yaitu kegiatan yang dilakukan remaja pada umumnya. Misalnya olah raga, sinoman, pengajian, dan selama ini karang taruna di sini juga berjalan cukup lancar dan baik. Anak-anak dan remaja sering digiring diajak untuk mengaji pada waktu sore hari. Semua berjalan atas anjuran para tokoh masyarakat dan orang tua masing-masing" (Wawancara degan Mohsin, 03 Oktober 1995).

Berdasarkan informasi para informan sebagaimana paparan di atas dapat ditafsirkan bahwa partisipasi ulama dalam pembinaan

remaja cukup strategis. Pembinaannya dilakukan melalui ceramah-ceramah baik dalam acara khusus maupun diselipkan dalam acara pengajian di masjid-masjid. Para ulama tidak langsung melakukan pembinaan didasarkan pada pendapat bahwa pemuda di desanya tidak menghadapi masalah dan sudah berjalan dengan baik.



Gb.3.11 Remaja dengan tekun mengikuti ceramah di sebuah Masjid.

### 3.8. Partisipasi Ulama dalam Pembinaan Pemuda

Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Sosial Budaya bidang Kepemudaan terutama dalam pembinaan mental spiritual. Dalam setiap pengarahan atau kegiatan kepemudaan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat mental spiritual selaras dengan ajaran agama (Islam). Misalnya kegiatan-kegiatan pendalaman masalah keagamaan, baik berupa ceramah-ceramah, dialog maupun pendalaman tafsir Al Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan yang pelaksanaannya pada malam hari.

"Untuk kegiatan remaja atau kepemudaan, kami mengadakan sholatan nariah pada setiap malam Selasa. Dengan mengamalkan sholat nariah dapat mensugesti seseorang sadar. Maksudnya menyadari keberadaannya yang mungkin banyak kekurangan dan kesalahannya. Juga bisa membentengi daerah dari bahaya dan yang paling penting adalah dapat mengurangi kenakalan remaja" (Wawancara dengan Muslih Nur, 23 September 1995)

Lebih lanjut dengan penanganan kepemudaan ini, Hajah Aizah mengatakan bahwa sebagai ulama ia sangat sering diminta untuk memberikan terapi atau penyadaran remaja/pemuda yang sering terlibat dalam kasus kenakalan remaja. Terapi yang diberikan dalam ceramah-ceramahnya berupa contoh-contoh kejadian nyata yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama (Islam). Semua itu dijalankan atas dasar niat : *amar ma'ruf nahi mungkar* dasar keikhlasan dengan mencari ridlo Allah tanpa tendensi keuntungan material.

"Semua ceramah saya, bagi generasi muda, saya maksudkan agar generasi muda atau para remaja tidak terlibat kenakalan remaja. Dalam hal ini yang melatarbelakangi kegiatan saya adalah panggilan jiwa tidak ada tendensi agar mendapat ganti berupa materi apa lagi jabatan (anggota DPR, sebab kebetulan ia adalah anggota DPRD Tk. II Kab. Demak fraksi PPP). Niat saya adalah : *amar ma'ruf nahi mungkar*, dengan keikhlasan mencari ridlo Allah" (Wawancara dengan Azizah, 03 Oktober 1995).

"Sejauh pengamatan saya, peran para ulama dalam bidang kepemudaan selain dakwah keagamaan yang mengarahkan agar remaja atau para pemuda tidak keblinger, tidak ada. Lha bagaimana mereka dapat mengikuti kegiatan kepemudaan kalau waktunya siang dan malam hanya untuk mengajar agama ?. Padahal masalah kepemudaan dan kegiatannya kan macam-macam. Sebenarnya para ulama itu punya pengaruh besar, oleh karenanya kalau mereka mau ya baik sekali. Tapi yang dibahas hanya masalah keagamaan thok!" (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

"Tokoh agama di sini pada umumnya berjuang hanya pada bidang keagamaan. Sementara itu minat remaja terhadap dunia kepemudaan pada umumnya rendah sekali apalagi kalau sudah

menyangkut masalah iuran atau pengadaan dana susah sekali. Dalam karang taruna kegiatan olah raga hanya insidental pada acara-acara tertentu saja; demikian juga sinoman. Kegiatan mereka itu juga bergerak tanpa tuntunan kyai, ya paling para tetua" (Wawancara dengan Sadat, 23 Oktober 1995).

"Untuk pembinaan kerokhanian generasi muda, khususnya anak-anak remajanya, kami mengadakan ceramah satu minggu satu kali. Ceramah tersebut adalah ceramah keagamaan. Ya para pemuda kami undang, mula-mula karena kegiatan tersebut diselenggarakan secara rutin, lama jadi biasa dan tanpa undangan khusus. Materinya ya mengarahkan agar anak muda selalu berada pada jalan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama. Juga dengan dialog. Pusat kegiatannya di masjid itu (sambil menunjuk), itu masjid kami dari orang tua yang terus kami rehab bersama masyarakat. Selain itu kami juga sering diundang untuk memberikan ceramah tentang kenakalan remaja di luar daerah. Selanjutnya untuk pemuda di sekitar sini, mereka sering kami sertakan dalam kegiatan lomba baris-berbaris, karnaval dan sebagainya yang dilaksanakan pada saat memperingati hari besar. Pernah pemuda sini jadi juara tingkat kecamatan" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995)

Dalam kegiatan kepemudaan dapat dikatakan banyak ulama yang pasif. Mereka kurang begitu menaruh perhatian pada masalah ini. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Suwandi, bahwa : "Kegiatan-kegiatan kepemudaan di sini pada umumnya ya digerakkan oleh para tokoh masyarakat, terutama tokoh formal. Ulama hanya ber-kutat pada kegiatan keagamaan misalnya lomba baca Al Qur'an. Nah kalau itu memang penggeraknya adalah para ulama, tapi lebih sering ya untuk para santrinya saja. Jarang masyarakat umum mendengar atau tahu akan hal itu" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September. 1995).

Sedangkan Djafar Shodiq dengan agak berdiplomasi menyatakan bahwa "Masalah kegiatan kepemudaan di kelurahan Mranggen, kami memang tidak ikut menangani langsung, tokh sudah ada yang menangani" (Wawancara dan Djafar Shodiq, 23 September 1995).



Gb. 3.12 Seorang Ulama sedang Ceramah

### 3.9. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Peranan Wanita

Partisipasi para Ulama dalam Pembangunan Sosial Budaya bidang Peranan Wanita di kelurahan Mranggen ternyata cukup menonjol, khususnya melalui bidang pembinaan kerokhanian-keagamaan. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah inilah para ulama dapat menunjukkan bagaimana seorang wanita sebagai ibu rumah tangga itu menjalankan tugasnya secara baik. Pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah ini tidak selalu dilakukan oleh para ulama setempat, melainkan sering juga mendatangkan pembicara (mubalig dan mubaliqot) terkenal dari kota lain. Melalui pembinaan oleh para ulama ini, para wanita di kelurahan Mranggen menjadi mantap dalam aktivitasnya. Karena mereka sangat mempercepat apa-apa yang dikatakan oleh para ulama. Sebagai contoh misalnya dalam kegiatan pembangunan menyangkut Keluarga Berencana, kalau para ulama mengatakan bahwa KB itu baik, maka dengan cepat mereka mengikutinya.



"Wanita adalah ibu rumah tangga, maka ia harus bisa mengatur dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangganya agar berjalan baik. Misalnya mengasuh, mendidik dan mengajari serta membimbing anak-anaknya dengan berbagai ajaran (pendidikan) dasar. Tapi kaum pria juga berkewajiban yang sama dalam rangka membimbing atau mendidik anak. Kalau wanitanya maju, maka negara pun maju. Nah untuk membimbing agar wanita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan kodratnya, mereka kami beri pengarahan dan tuntunan-tuntutan sesuai dengan ajaran agama. Dalam kitab banyak dicontohkan bagaimana wanita yang baik itu. Pengajian untuk kaum ibu (wanita) biasa kami adakan satu minggu dua kali, tiap Jum'at dan Minggu" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995).

Dalam pembangunan di segala bidang peranan wanita diakui memiliki peranan yang sangat penting, demikian juga dalam rangka memajukan umat. kaum wanita di kelurahan Mranggen ternyata juga mempunyai potensi dan peranan yang cukup besar untuk ikut bersama-sama memajukan umat. Hal ini ikut mendorong pemilihan materi ceramah para ulama sebagaimana diakui oleh Muslih Nur dengan mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh ibunya dan aktivitas ulama yang lain. Dikatakannya : "Seperti ibu saya, dari dulu sudah mengadakan pengajian untuk kaum wanita. Pesertanya juga banyak, para ibu dan juga wanita yang belum bersuami. Materinya kadang juga diberikan oleh tokoh masyarakat atau pemerintah seperti Camat, Lurah dan sebagainya. Dengan demikian para ibu dan wanita pada umumnya dapat menambah pengetahuannya untuk bekal mengatur rumah tangganya. Baik ilmu keagamaan, pengetahuan maupun ketrampilan-ketrampilan lainnya yang bisa menunjang kesejahteraan kehidupan rumah tangganya" (Wawancara dengan Muslih Nur 23, September 1996).

"Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga ya harus bisa mendudukan diri sesuai dengan kodratnya. Tanggung jawab wanita berat, mengasuh, mendidik, membesarkan dan mengarahkan anak-anaknya, jadi harus punya bekal yang cukup. (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

"Wanita sebagai ibu rumah tangga ya kewajibannya mengatur rumah tangga. Dalam kehidupan di masyarakat ada kumpulan arisan RT, RW dan kelompok PKK. Itu tempat-tempat para ibu menambah pengetahuan dan ilmu. Sebulan sekali paling tidak saling bertemu, bisa arisan, bisa juga sambil memperdalam ketrampilan atau menambah pengetahuan lainnya. Lha ini masalah kesehatan anak, khususnya balita, siapa kalau bukan ibu ? Posyandu juga ada, taman gizi digerakkan oleh tokoh wanita misalnya istri RT, istri RW atau bu Lurah pokoknya di situ ada pelayanan balita yang diurus oleh ibu-ibu" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

"Peranan wanita ya sebagai ibu rumah tangga, lainnya paling ya ikut-ikutan. memang ada tokoh wanita seperti Azizah, itu kan memang keturunan dari orang tuanya. Kalau di sini ya istri RT, RW, Lurah itu otomatis tapi ya tetep nimba ilmu pada para kyai atau ulama khususnya tentang kodrat kewanitaannya" (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

"Kami kaum wanita di sini juga aktif memberantas kemiskinan dengan memberikan langsung kepada para yatim piatu serta fakir miskin. Kaum wanita juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan umat. Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka ibu-ibu sangat besar pengaruh dan artinya bagi anak-anaknya. Pertama kali anak mengenal dunia sudah pasti dari ibunya, nah baik, buruk atau kenakalan anak wanita cukup besar andilnya, tapi para bapak juga bertanggung jawab. Jangan lupa peranan wanita tidak hanya membesarkan, mengasuh dan mendidik anak, tetapi sebagai ibu rumah tangga ia harus bisa mengatur rumah tangganya, melayani suami dan seluruh keluarga dengan baik. Kalau wanita baik, maka dunia pun akan baik pula. *Almar artu ibadil bilad warda sunhat sholihatul bilad, waida fasabat washobatul bilas*, pada prinsipnya wanita adalah tiang negara. Nah kalau sebagai tiang tidak bisa berdiri tegak (robok) apakah negara bisa berdiri tegak ? Kesimpulannya kalau wanitanya itu baik, maka negaranya pun akan baik pula" (Wawancara dengan Azizah, 03 September 1995).

Kegiatan wanita di luar rumah secara umum kurang begitu menonjol. Pada umumnya mengikuti kegiatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh aparat kelurahan. Tetapi karena pertimbangan repot, baik karena mengurus rumah tangga, maupun bekerja untuk membantu suami, maka kegiatan kurang aktif. "Kegiatan kewanita-an di sini ya hanya di PKK, tidak aktif. Kalau ada undangan ya datang. Peran yang menonjol ya hanya sebagai ibu rumah tangga, mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang baik, suami mencari nafkah pokok. Ibu ya bisa bantu seperti istri saya buka rias pengantin, kan lumayan buat tambahan penghasilan walaupun hanya musiman" (Wawancara dengan Sadad, 23 September 1995).

### 3.10. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

Partisipasi ulama dalam Pembangunan Sosial Budaya bidang Perumahan dan Pemukiman relatif tidak ada. Hal itu disebabkan rata-rata penduduk sudah sadar dan tahu tentang keadaan dan kondisi rumah yang sehat. Sementara pola pemukiman mengikuti tata atur yang sudah ada dan hingga sekarang belum pernah ada masalah serius sehubungan dengan perumahan dan pemukiman.

"Soal perumahan dan pemukiman, saya kira bapak-bapak bisa tahu dan lihat sendirilah. Itu jalan-jalan di kampung ini juga sudah beraspal. Rumah-rumah juga tampak sudah berjendela kan sehat, tidak ada lagi *kandang kebo* di dalam rumah atau penghuni rumah tinggal bersama kebonyanya. Dulu memang ada, banyak. Mereka takut hewannya dicuri, jadi tidur ya *dikeloni*, tapi sekarang tidak lagi. Kalau masalah rumah, lha itu anak saya, setelah menikah ya cari rumah sendiri, itu dapat di Pucanggading, kalau pagi mau berangkat kerja menitipkan anaknya di sini, siang atau sore diambil, ya itu resiko rumah tangga yang suami istri bekerja (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).

"Perumahan dan pemukiman, kami rasa di sini tidak ada masalah, Pak, semuanya sudah dikembangkan dan di tata sesuai dengan anjuran dan berdasarkan kemampuan masing-masing penghuninya" (Wawancara dengan Djafar Shodiq, 23 September 1995).

"Untuk perumahan dan pemukiman, dalam hal kemanfaatannya, kita sering memanfaatkan rumah-rumah sebagai kegiatan ibadah. Misalnya dengan penyelenggaraan TPA atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian rutin atau pertemuan-pertemuan lainnya. Sedangkan dari segi penataan ya dari dulu sudah begitu" (Wawancara dengan Muslih Nur, 23 September 1995).

Perumahan dan pemukiman di kelurahan Mranggen sini ya untuk rata-rata penduduk di sini walaupun dengan rumah papan dan gedheg tapi rata-rata sudah tertata dengan baik dan bersih. Pengaturannya sudah berjalan sedemikian rupa sedari dulu, saluran atau parit sudah diusahakan ada" (Wawancara dengan Sadad, 23 September 1995).

"Perumahan dan pemukiman di sini rata-rata sudah baik, maksudnya meskipun masih sederhana tetapi sudah layak huni" (Wawancara dengan Hj. Azizah, 03 Oktober 1995). Apa yang dikatakan oleh Hajah Azizah ini memang tidak keliru. Sebab berdasarkan pengamatan peneliti memang keadaan rumah-rumah di kelurahan Mranggen sudah cukup baik. Bahkan di beberapa tempat rumah-rumah dan lingkungan jalannya sudah tertata rapi.

"Sebagai ketua RW, masalah pemukiman dan perumahan ya paling kami anjurkan kepada masyarakat agar menata dan selalu membenahi lingkungan masing-masing. Tentang kebersihan bersama, kelancaran saluran dan sebagainya nyatanya tidak ada masalah" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

"Tentang perumahan dan pemukiman disini khususnya tentang jalan-jalan memang belum diaspal, tapi sudah ada upaya pengerasan" (Wawancara dengan Abdul Karim, 23 September 1995).

### **3.11. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Olah Raga**

Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Sosial Budaya bidang Olah Raga berkecenderungan hanya mengikuti yang telah ada dan berkembang dalam arti ulama tidak mempunyai ide tentang pembinaan keolahragaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ulama kurang ikut secara aktif berperan. Kekurangaktifan para ulama

dalam bidang keolahragaan ini baik menyangkut hal-hal yang bersifat pembinaan untuk mencapai prestasi maupun pengembangan atau pemasyarakatan satu bentuk olah raga tertentu.

Hidup, berkembang atau hilangnya salah satu bentuk olah raga dalam kehidupan masyarakat terserah kepada masyarakat penggemar atau peminatnya itu sendiri, ulama tidak ikut cawe-cawe (tidak ikut campur). Hal itu disebabkan karena para ulama pada umumnya sudah merasa kekurangan waktu untuk menekuni bidang keyakinannya, yaitu bidang keagamaan. Hal ini juga karena kondisi masyarakat setempat sendiri pada umumnya yang berkecenderungan kurang menaruh minat atau perhatian terhadap kegiatan olah raga.

"Dulu kami pernah mencoba membina dan mengadakan olah raga bela diri. Tempat latihan di sebelah kiri mesjid, waktunya setiap malam Jum'at. Pengikutnya waktu itu juga cukup banyak. Bahkan untuk seragam juga kami telah memiliki. Tapi akhirnya lambat laun bubar dengan sendirinya. Hal itu disebabkan kami selaku pelatih sering tidak bisa hadir melatih karena memenuhi undangan dakwah. Dengan ketidakhadiran kami, praktis latihan juga batal. Kami sering tidak hadir, maka lambat laun murid-murid kami jadi enggan datang dan akhirnya bubar sendiri. Sedangkan untuk jenis olah raga lainnya, kami memang tidak pernah terlibat atau melibatkan diri. Barangkali waktu kami banyak tersita untuk kegiatan keagamaan, sehingga untuk masalah olah raga kami tidak bisa berperan" (Wawancara dengan Muslih Nur, 23 September 1995).

Sementara itu kalau tokoh ulama terlibat dalam kegiatan keolahragaan, itu bersifat hanya nyepuhi atau duduk sebagai penasihat, atau sekali-kali sebagai sponsor, baik dalam artian menyediakan tempat atau perlengkapan olah raganya, ataupun menyumbang sedikit dana kalau diminta.

"Dalam masalah keolahragaan, ya . . . kami hanya mengikuti mereka (pemuda yang dimaksud) saja. Paling ya itu, menjelang tujuhbelasan. Sebagai orang tua, kami sering dijadikan penasihat. Terus terang kami jarang mencampuri masalah olah raga yang sesungguhnya, karena memang kami kurang begitu banyak

tahu masalah keolahraagaan ini" (Wawancara dengan KH Abdul Karim, 23 September 1995).

"Wah kalau masalah olah raga di sini memang sulit, betul-betul sulit sekali untuk berkembang. Sebagai contoh, saya itu telah menyediakan meja ping-pong (tenis meja), net, dan bednya. Tetapi kalau tidak ada bolanya (bolanya pecah) mereka tidak mau beli lagi, padahal berapa sih harganya ?. Padahal untuk net dan bednya telah kami sediakan, tapi lha kalau tidak ada bolanya. apa ya bisa main ?. Kalau begitu terus bagaimana mau maju ?. Ini kelemahanya, mereka rata-rata mau main tetapi tidak mau keluar biaya. Tapi sekarang Pak Lurah sedang gemar pada olah raga sepak bola, ia suka menyeponsori, ya anak-anak di sini saya arahkan untuk ikut sepak bola saja, juga bola volley, itu juga ada yang nyeponsori jadi pemainnya tak ditarik iuran, dalam hal ini mereka senang. Padahal kalau kyai yang minta sumbangan untuk kegiatan keagamaan rata-rata mereka mau menyumbang banyak, tapi untuk olah raga ? Beli bola ping-pong saja tidak mau ! Pokoknya susahlah !" (Wawancara dengan Sadad, 23 September 1995).

Sedangkan ulama yang sadar akan manfaat olah raga bagi kesehatan fisik, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam masalah pembinaan keolahraagaan, tapi sering menganjurkannya kepada masyarakat, "Untuk olah raga, kami tidak mengadakan/ menyelenggarakan pembinaan secara langsung atau menanganinya. Tapi dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misanya dalam pertemuan dengan masyarakat kami kadangkala menyinggung masalah olah raga. Karena kami wanita, ya tentu saja olah raga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Saya tandaskan bahwa olah raga itu sangat perlu bagi kesehatan khususnya jasmani, kalau jasmani sehat, maka rokhanipun akan sehat pula. Jadi olah raga itu perlu, juga bagi wanita, tapi ya harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Nah kalau jasmaninya sudah disehatkan melalui kegiatan olah raga yang sesuai, kemudian rokhaninya disehatkan melalui pengajian-pengajian" (Wawancara dengan Azizah, 03 Oktober 1995).

Bahwa para ulama di kelurahan Mranggen kurang berperan secara aktif dan terjun langsung dalam pembinaan dan pengem-

bangun olah raga di lingkungannya, hal ini dinyatakan oleh banyak warga setempat, dan diakui juga oleh beberapa ulama yang sempat diwawancarai. Berikut ini beberapa pernyataan yang dapat dianggap mewakili mereka itu.

"Masalah olah raga kami memang tidak membina, biar masyarakat sendiri khususnya yang menggemari olah raga tertentu itu yang berusaha. Biarlah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kehendak dan kesukaan masyarakatnya !" (Wawancara dengan KH Sjafar Shodiq, 23 September 1995).

"Ulama tidak pernah membina olah raga. Selain itu, untuk tingkat RT dan RW kegiatan olah raga bersifat musiman, karenanya penyelenggaraannya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, khususnya pada waktu menyambut hari-hari besar saja. Misalnya menyambut hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau tujuhbelasan. Pada saat-saat seperti ini memang ramai sekali" (Wawancara dengan Suwandi, 23 September 1995).

"Olah raga di sini ramai walau hanya menjelang tujuhbelasan saja dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan. Jenis-jenis olah raga itu adalah tenis meja, sepak bola, catur, gerak jalan, sepeda santai. Dan terhadap kegiatan olah raga menjelang tujuhbelasan itu kami semua mengikutinya. Nah untuk orang tuanya ramai sekali diadakan pertandingan bola kasti. Sampai sekarang kasti ini masih sering latihan, yang jelas semua menunggu atasan, kelurahan, RT / RW. Kalau ada kegiatan tidak digong (diminta/diawali/disponsori) tidak akan jalan !" (Wawancara dengan Machin, 03 Oktober 1995).



Gb. 3.13 Peneliti sedang wawancara dengan salah seorang ulama.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa para ulama memiliki peran dan kedudukan strategis dalam pembangunan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, ulama dapat menjalankan fungsi sebagai panutan dan pengendali (kontrol) dalam kehidupan masyarakat. Kedudukannya sejajar dengan pemimpin formal bahkan tidak jarang masyarakat menganggapnya lebih tinggi dari pemimpin formal dan menjadikan mereka sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku dan perbuatan para ulama sehari-hari pada umumnya diikuti oleh kelompok masyarakat dibawahnya. Masyarakat seringkali menerimanya tanpa reserve.

Peranan para ulama di kelurahan Mranggen dalam pembangunan sosial budaya terbukti sangat bervariasi baik dalam bentuk maupun jenisnya. Berikut ini kesimpulan dan saran hasil penelitian yang dapat dicapai.

#### **4.1. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari laporan hasil penelitian tentang Peranan Ulama dalam Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat di daerah Jawa Tengah ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

#### 4.1.1. Partisipasi Ulama dalam Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi ulama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dilakukan melalui kegiatan penyiangan dana yang dihimpun secara suka rela dan kegiatan zakat fitrah yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu atas inisiatif para ulama juga pernah dirintis berdirinya koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Modal dasarnya berasal dari para ulama dan tokoh masyarakat yang mampu dan mempunyai kelebihan. Peminjam diprioritaskan untuk anggota masyarakat yang dipandang kurang atau bahkan tidak mampu. Sayang koperasi ini akhirnya macet karena para peminjamnya tidak mengembalikan atau mengangsur meskipun tidak dibatasi waktunya serta tanpa bunga.

Upaya peningkatan kesejahteraan melalui bidang pekerjaan bagi masyarakat, secara riil peran serta atau partisipasi para ulama di kelurahan Mranggen kurang begitu tampak. Hal itu di samping para ulama tidak mempunyai dan dapat menyediakan lapangan kerja, juga dalam beberapa hal sulit atau kurang dapat bisa memberikan wawasan, motivasi atau dorongan sehubungan dengan masalah pekerjaan. Dalam kondisi yang demikian masih ditambah dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang heterogen dan relatif masih rendah. Masyarakat setempat, khususnya tenaga pekerja muda cenderung urban baik ke kota-kota terdekat seperti Semarang maupun ke Ibukota (Jakarta) untuk mencari pekerjaan sebagai buruh kasar.

Kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di kelurahan Mranggen yang juga mendapat perhatian masyarakat di antaranya adalah masalah kebersihan bersama, pengaturan selokan/got, pengerasan jalan, pembuatan jembatan. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut sering kali bukan merupakan produk pemikiran para ulama melainkan timbul dari kesadaran masyarakat itu sendiri, tetapi dalam praktik para ulama juga ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 4.1.2. Partisipasi Ulama dalam Pendidikan

Partisipasi Ulama di kelurahan Mranggen dalam aspek pendidikan tampak pada keterlibatan langsung para Ulama dalam kiprah dunia pendidikan. Sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kehidupannya yang kental dengan masalah-masalah keagamaan (Islam), maka dunia pendidikan yang digelutinya pun adalah pendidikan agama (Islam). Bahkan karena kuatnya latar belakang keagamaannya, masalah materi sebagai imbalan jerih payahnya berkiprah dalam dunia pendidikan sama sekali tidak difikirkan.

Semangat yang muncul lebih berorientasikan pada pemenuhan sebagian kewajibannya sebagai umat beragama (Islam) yang ikut bertanggung jawab membawa umatnya menuju ke kesejahteraan hidup dunia dan akhirat melalui ridlo Allah daripada mengejar keuntungan material.

Para ulama di kelurahan Mranggen cukup aktif berperanserta dalam rangka ikut memajukan dunia pendidikan masyarakat Mranggen. Peranserta yang mereka jalankan ternyata bervariasi melalui berbagai cara, baik melalui ceramah, dialog, khotbah, pengajian, terjun dalam yayasan-yayasan sosial yang mengelola pendidikan, maupun aktif sebagai donatur tetap dalam penyelenggaraan suatu bentuk pendidikan.

Partisipasi golongan ulama dalam bidang pendidikan, lebih tercurah pada pendidikan agama. hal ini disebabkan oleh berkembangnya anggapan para ulama bahwa pembinaan dalam bidang pendidikan keagamaan merupakan tanggung-jawabnya. Bahkan mereka memiliki perasaan terpanggil untuk memberikan dan menyebarluaskan ilmu agama yang dimiliki. Tingginya tingkat partisipasi ulama dalam pembinaan pendidikan agama juga didasari oleh kesadaran para ulama terhadap fungsi sosial ulama. Dalam diri para ulama terdapat perasaan berdosa apabila tidak mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya. berdasarkan hal-hal itulah secara umum para ulama berpartisipasi dalam pembinaan pendidikan keagamaan yang ditujukan pada semua kalangan dan umur.

Di antara para ulama dalam upaya pengembangan dan pembinaan keagamaan ada yang telah memiliki institusi khusus seperti lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Pada umumnya santrinya berasal dari berbagai daerah, tidak terbatas pada mereka yang berasal dari kelurahan Mranggen dan sekitarnya. Motivasi para ulama untuk mendirikan pondok pesantren ada yang didasarkan pada amanat yang disampaikan oleh para pendahulunya (gurunya) sebagai bentuk pengamalan ilmu yang telah diperolehnya, tetapi ada pula dasar pemikiran lain yang mendorong di antara para ulama untuk mendirikan pondok pesantren.

Sebagai realisasi dari peranserta para ulama dalam dunia pendidikan itu, maka di kelurahan Mranggen banyak didirikan TPA (Tempat Pendidikan Al Qur'an) bagi anak dan remaja, Pondok-pondok Pesantren, MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Dalam TPA khusus diajarkan pendalaman pembacaan huruf Arab (Al Qur'an) dan tafsirnya. Sedangkan dalam MI (yang setingkat dengan Sekolah Dasar) materi pelajarannya hampir sama dengan kurikulum jenjang pendidikan sekolah dasar, tetapi materi keagamaannya lebih mendapatkan prioritas penekanan-nya dibanding dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Demikian halnya dengan MTs yang setara dengan Sekolah Menengah Umum.

Walaupun sistem manajerialnya diupayakan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, tetapi hal-hal yang menyangkut penarikan dana (SPP, BP3, dan sebagainya) dilaksanakan relatif lebih lunak yang kesemuanya diupayakan untuk tidak memberatkan orang tua siswa. Bagi yang benar-benar tidak mampu, mereka dibebaskan sama sekali dari kewajiban membayar biaya pendidikan.

#### **4.1.3. Partisipasi Ulama dalam Bidang Kebudayaan**

Partisipasi para ulama di kelurahan Mranggen dalam pembangunan dan pengembangan kebudayaan khususnya kesenian tidaklah banyak, hanya terbatas pada kesenian yang

bernafaskan Islam, dan sifat keterlibatannya juga terbatas. Keterlibatan para ulama dalam pembinaan kesenian pada umumnya sebatas pada memberikan pengarahan dan meluruskan kegiatan dari hal-hal yang bersifat akan menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Oleh karena itu jenis-jenis kesenian yang menurut pertimbangan para ulama itu tidak sesuai dengan nafas agama tidak mereka setujui. Hal-hal yang bersifat pembinaan dalam arti pembentukan kelompok atau group kesenian, penyelenggaraan waktu latihan yang rutin, penguasaan suatu instrumen atau alat kesenian tertentu maupun hal-hal lain yang bersifat teknis tidak pernah dilakukan. Dengan kata lain partisipasi ulama dalam pembangunan sosial budaya bidang kebudayaan khususnya kesenian tersebut hanya pada bentuk dan materi seni (pertunjukan) saja.

#### **4.1.4. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Kesehatan**

Partisipasi Ulama dalam pembangunan sosial budaya bidang kesehatan di kelurahan Mranggen tampak cukup menonjol. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan masalah kesehatan sering disinggung oleh para ulama dalam pembicaraannya dengan masyarakat baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar himbauan dari pemerintah. Rata-rata penduduk di Mranggen telah dasar akan arti kesehatan bagi kehidupan ini, oleh karena itu seringkali masalah ini tidak disinggung. Atau walaupun hal itu dibicarakan biasanya sifatnya hanya sekedar untuk mengingatkan.

Hal yang kiranya dalam kehidupan sehari-hari sering terlewatkan adalah masalah kesehatan lingkungan. Meskipun kesadaran itu ada, tapi karena alasan kesibukan dan lain-lain masalah kesehatan lingkungan terlewatkan. Padahal masalah kebersihan itu haruslah rutin, dilakukan dan dikerjakan secara terus menerus. Kenyataannya pada suatu saat di lingkungan warga masyarakat kadang-kadang nampak bersih, tetapi saat lain kotor, begitu seterusnya. Kegiatan kebersihan lingkungan biasanya marak pada saat-saat tertentu saja, misalnya menjelang peringatan hari besar nasional, atau akan diadakan lomba kebersihan.

Untuk kesehatan bersama atau kesehatan lingkungan, para ulama sering menganjurkan kepada masyarakat untuk menata dan mengatur selokan/parit, mencoba menanggulangi banjir atau air yang mambek dengan membuat saluran baru. Sedangkan masalah wabah suatu penyakit, para ulama juga sering menganjurkan penanggulangannya melalui kothbah-kothbah saya. Peranan para ulama seingkali hanya terbatas dalam memberi ceramah saja, tetapi terjun langsung secara riil dalam kegiatan kebersihan lingkungan jarang dilakukan.

#### **4.1.5. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera**

Partisipasi Ulama dalam pembangunan Keluarga Sejahtera tampak cukup menonjol. Dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, masalah kesejahteraan keluarga sering disinggung oleh para ulama dalam pembicaraannya dengan masyarakat baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar himbauan dari pemerintah. Rata-rata penduduk di Mranggen telah sadar akan arti keluarga sejahtera bagi kehidupan ini, oleh karenanya masalah tersebut tidak banyak disinggung dalam arti dibicarakan dalam rangka terapi. Kalau tokoh dibicarakan lebih banyak mengenai kesehatan ibu dan anak, dalam hal ini adalah Keluarga Berencana.

Masalah Keluarga Berencana di Kelurahan Mranggen memang didukung sepenuhnya oleh para ulama. Bahkan bagi mereka yang tidak mengikuti program Keluarga Berencana juga mendukung, dan ikut menyebarkan.

#### **4.1.6. Partisipasi Ulama dalam bidang Kependudukan**

Masalah kependudukan yang berkaitan dengan perencanaan dan pembatasan kelahiran sebagai upaya menekan laju jumlah penduduk melalui program KB telah disinggung di depan. Sementara itu kalau dilihat dari komposisi jumlah penduduknya di desa Mranggen, dengan jumlah KK 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) dan jumlah jiwa keseluruhan 8.198 (delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) orang, maka rata-rata tiap KK berjumlah 4 Jiwa. Hal itu mencerminkan

kan angka ideal yang sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, yaitu catur warga. Dengan demikian mengenai aspek kependudukan bisa dikatakan tidak ada masalah, dalam arti sesuai dengan canangan kebijakan pemerintah pada umumnya.

Berkaitan dengan penduduk dan peluang pekerjaan juga sudah disinggung di bagian muka, yang pada hakekatnya bahwa penduduk di kelurahan Mranggen tidak ada masalah. Yang mungkin perlu terus ditingkatkan adalah masalah sumber daya yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan memegang peranan penting. Peranan ulama dilakukan melalui sektor ini.

#### **4.1.7. Partisipasi Ulama dalam Pembinaan Anak dan Remaja**

Pembinaan anak dan remaja, memang dipisahkan. Untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah, diarahkan melalui pendidikan formal. Baik sekolah negeri, swasta maupun madrasah. Dengan demikian pendidikan formalnya mereka dapatkan di sekolah-sekolah, sedang pendidikan keagamaannya melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid dan TPA-TPA yang banyak tersebar di Mranggen. Sementara itu untuk para remajanya diarahkan agar senantiasa bisa mengikuti kegiatan pendalaman keagamaan agar terhindar dari kasus-kasus kenakalan remaja. Ternyata hal itu cukup efektif, pesertanya juga cukup banyak, bahkan bisa dikatakan semua remaja di Mranggen selalu mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah dan dialog keagamaan yang diselenggarakan di masjid-masjid. Kecuali itu juga dipikirkan kegiatan yang sesuai dengan dunia remaja dan anak. Misalnya dengan mengikutsertakan mereka dalam karnaval, lomba gerak jalan, baris-berbaris dan sebagainya.

Partisipasi ulama dalam pembinaan remaja cukup strategis. Pembinaannya dilakukan melalui ceramah-ceramah baik dalam acara khusus maupun (diselipkan) dalam acara pengajian di masjid-masjid. Para ulama tidak langsung melakukan pembinaan didasarkan pada pendapat bahwa pemuda di desanya tidak menghadapi masalah dan sudah berjalan dengan baik.

#### **4.1.8. Partisipasi Ulama dalam Pembinaan Pemuda**

Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Kepemudaan dalam pembinaan mental spritual. Dalam setiap pengarahan atau kegiatan kepemudaan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat mental spiritual selaras dengan ajaran agama (Islam). Misalnya kegiatan-kegiatan pendalaman masalah keagamaan, baik berupa ceramah-ceramah, dialog maupun pendalaman tafsir Al Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan yang pelaksanaannya pada malam hari.

Untuk kegiatan remaja atau kepemudaan, diadakan sholawatan nariah pada setiap malam Selasa. Dengan mengamalkan sholawat nariah dapat mensugesti seseorang sadar. maksudnya menyadari keberadaannya yang mungkin banyak kekurangan dan kesalahannya.

Selain itu dalam rangka memberikan terapi kepada remaja, dalam ceramah-ceramahnya diberikan contoh-contoh kejadian nyata yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama (Islam). Semua ceramah bagi generasi muda dimaksudkan agar generasi muda tidak terlibat kenakalan.

Dalam kegiatan riil kepemudaan dapat dikatakan banyak ulama yang pasif. Mereka kurang begitu menaruh perhatian pada masalah ini. Hal ini disebabkan selain karena ada anggapan bahwa hal itu sudah ada yang mengangani, para ulama lebih mengkhususkan pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan keagamaan.

#### **4.1.9. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Peranan Wanita**

Partisipasi para Ulama dalam sektor Peranan Wanita di kelurahan Mranggen ternyata cukup menonjol, khususnya melalui bidang pembinaan kerokhanian-keagamaan. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah inilah para ulama dapat menunjukkan bagaimana seorang wanita sebagai ibu rumah tangga itu menjalankan tugasnya secara baik.



Melalui pembinaan oleh para ulama ini, para wanita di kelurahan Mranggen menjadi mantap dalam aktivitasnya. Karena mereka sangat mempercayai apa-apa yang dikatakan oleh para ulama. Sebagai contoh misalnya dalam kegiatan pembangunan menyangkut KB, kalau para ulama mengatakan bahwa KB itu baik, maka dengan cepat mereka mengikutinya.

Dalam pembangunan di segala bidang peranan wanita diakui memiliki peran yang sangat penting, demikian juga dalam rangka memajukan umat. Kaum wanita di kelurahan Mranggen ternyata juga mempunyai potensi dan peranan yang cukup besar untuk ikut bersama-sama memajukan umat. Hal ini ikut mendorong pemilihan materi ceramah para ulama.

#### **4.10. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Perumahan dan Pemukiman**

Partisipasi ulama dalam Pembangunan bidang Perumahan dan Pemukiman relatif tidak ada. Hal itu disebabkan rata-rata penduduk sudah sadar dan tahu tentang keadaan dan kondisi rumah yang sehat. Sementara pola pemukiman mengikuti tata atur yang sudah ada dan hingga sekarang belum pernah ada masalah serius sehubungan dengan perumahan dan pemukiman.

#### **4.11. Partisipasi Ulama dalam Pembangunan Olah Raga**

Partisipasi Ulama dalam bidang olah raga berkecenderungan hanya mengikuti yang telah ada dan berkembang, dalam arti ulama tidak mempunyai ide tentang pembinaan keolahragaan di kelurahan Mranggen. Bahkan bisa dikatakan bahwa ulama kurang ikut secara aktif berperan. Kekurangaktifan para ulama dalam bidang keolahragaan ini baik menyangkut hal-hal yang bersifat pembinaan untuk mencapai prestasi maupun pengembangan atau pemasyarakatan satu bentuk olah raga tertentu.

Hidup, berkembang atau hilangnya salah satu bentuk olah raga dalam kehidupan masyarakat terserah kepada masyarakat penggemar atau peminatnya itu sendiri, ulama tidak ikut

cawe-cawe (tidak ikut campur). Hal itu disebabkan karena para ulama pada umumnya sudah merasa kekurangan waktu untuk menekuni bidang keyakinannya, yaitu bidang keagamaan. Hal ini juga karena kondisi masyarakat setempat sendiri pada umumnya yang berkecenderungan kurang menaruh minat atau perhatian terhadap kegiatan oleh raga.

## 4.2. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- 4.2.1. Karena para ulama itu menempati kedudukan yang sangat strategis di dalam masyarakat, di mana masyarakat menjadikannya sebagai tokoh anutan yang segala tindakannya akan diikuti, maka diharapkan para ulama dapat selalu berpandangan jauh ke depan dan maju mengikuti gerak langkah pembangunan. Dengan cara demikian maka masyarakat akan secara tidak terasa akan bergerak ke arah pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan dinamika pembangunan.
- 4.2.2. Karena pembangunan sosial budaya itu berdimensi luas dan banyak, maka peranan ulama secara luas yang sudah ada perlu terus ditingkatkan baik secara vertikal (mendalam pada satu segi atau aspek sosial budaya tertentu) maupun secara horisontal (meluas pada segi-segi atau aspek-aspek sosial budaya yang lain). Hal ini sesuai dengan pembangunan sosial budaya itu sendiri yang berdimensi banyak.
- 4.2.3. Dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, ulama selain sebagai tokoh juga sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ini berarti bahwa selain pengembangan dan pendalaman aktivitas keagamaannya, para ulama juga perlu secara aktif mengembangkan aktivitas-aktivitas lain seperti ikut kerja bakti, membina kegiatan olah raga remaja, rapat-rapat RT, dan kegiatan lain secara rutin dalam kehidupan bermasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam kehidupan bermasyarakat tindakan-tindakan riil sangat penting dan perlu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cochrane, Glynn. 1971. **Development Anthropology**. New York : Oxford University Press.
- Hutington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1990. **Partisipasi Politik Di Negara Berkembang**. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta : Rineka Cipta.
- Joyomartono, Mulyono. 1991. **Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan**. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Koentjaraningrat. 1982 **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**. Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1983 **Metode-metode Penelitian Masyarakat**. Jakarta : Gramedia.
- Moloeong, Lexy J. 1989. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung : Remadja Karya.
- Roders, Everett M. (ed). 1985. **Komunikasi dan Pembangunan : Perspektif Kritis**. Jakarta : PT AUUD.
- Said. Oemar. 1990. "Kebijaksanaan Pembangunan Desa". Dalam Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo. **Sosiologi Pedesaan**. Yogyakarta : Gajah mada University Press.
- Sumanto, RB. 1987. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan", dalam **DILEMA**. Surakarta : FISIPOL UNS Surakarta.
- Sutopo, HB. 1990 . **Metode Penelitian Kualitatif**. Surakarta : Lembaga Penelitian dan Pengembangan UNS Surakarta.
- TAP MPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993).
- Uphoft, Norman T. John M. Cohen, Arthur A. Goldsmith. 1979. **Feasibility and Application of Rural Development Participation**. A State - of - the Art Paper. Rural Development Communities Center for International Studies Cornell University.
- Widjaja, A.W. Ed. 1985. **Individu Keluarga dan Masyarakat**. Jakarta : Akademika Pressindo.

## DAFTAR INFORMAN

N a m a : SUWANDI  
 Umur : 57 tahun  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Pendidikan : SGB  
 Alamat : Jl. Pungkuran 305  
 Mranggen, Demak

N a m a : S A D A D  
 Umur : 54 tahun  
 Pekerjaan : Purnawirawan ABI  
 Pendidikan : SMP  
 Alamat : Jl. Jatikusuma 582  
 Mranggen, Demak

N a m a : KH ABDUL KARIM  
 Umur : 53 tahun  
 Pekerjaan : Guru Madrasah (MTs dan Aliyah)  
 Pendidikan : Pondok Pesantren Serang, Rembang  
 Alamat : Jl. PPrigi, Gang II  
 Mranggen, Demak

N a m a : H. MUSLIH NUR  
 Umur : 45 tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : Univ. Darul Ulum, Jomblang  
 Alamat : Jl. Kauman Rt. 02/Rw. 2 No. 133  
 Mranggen, Demak

N a m a : H. DJAFAR SHODIQ  
 Umur : 54 tahun  
 Pekerjaan : Guru MTs.  
 Pendidikan : Pondok Pesantren  
 Alamat : Jl. Kauman 08  
 Mranggen, Demak

N a m a : Hj. AZIZAH  
 Umur : 41 tahun  
 Pekerjaan : DPRD Tk. II Kab. Demak  
 Pendidikan : Aliyah  
 Alamat : Jl. Raya Mranggen No. 195  
 Mranggen, Demak

N a m a : MACHIN  
 Umur : 38 tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : Aliyah  
 Alamat : Jl. Prigi Gang IV  
 Mranggen, Demak

N a m a : NUROCHIM  
 Umur : 18 tahun  
 Pekerjaan : Pelajar MAN  
 Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri  
 Alamat : Jl. Raya Mranggen No. 98  
 Mranggen, Demak

## DAFTAR RALAT

| No. | Hal | Baris |       | Tertulis                      | Yang benar          |
|-----|-----|-------|-------|-------------------------------|---------------------|
|     |     | Atas  | Bawah |                               |                     |
| 1.  | V   |       | 7     | NGUNAN<br>SOSIAL BUDAYA ..... | SOSIAL BUDAYA ..... |

Perpustakaan  
Jenderal